



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

*Selamat Natal 2022
&
Tahun Baru 2023*



NEWSLETTER

infoHUBDAT

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

EDISI TRIWULAN 04 / 2022

INFO KHUSUS

**Touring
Kendaraan
Listrik G20
Jakarta-
Bali**



**KESIAPAN
DAN PENGENDALIAN
TRANSPORTASI DARAT
JELANG NATARU**



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Hari
Antikorupsi
Sedunia 2022

Indonesia Pulih
Bersatu Berantas
Korupsi

Penyediaan kendaraan listrik pada event G20 membuktikan komitmen Indonesia dalam mewujudkan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan, sebagai upaya bersama negara-negara di dunia untuk mengatasi krisis energi dan menangani perubahan iklim.

Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memeriksa kesiapan bus listrik merah putih yang akan digunakan sebagai angkutan untuk melayani para delegasi dan peserta KTT G20. Sebanyak 30 bus listrik disiapkan untuk mendukung perhelatan internasional ini. Bali, 10/11/2022. Foto: BKIP/Christanto



Assalamualaikum Wr.Wb.

Apa kabar pembaca setia *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman?

Kita bersua kembali melalui *Newsletter* infoHUBDAT sebagai sarana menjalin tali silaturahmi dan berbagi informasi. Teriring salam hangat dan doa kepada pembaca sekalian semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, dengan harapan dapat menjadi motivasi kita bersama dalam memberikan pelayanan jasa transportasi darat kepada masyarakat.

Pembaca yang budiman, tak terasa kita telah tiba di penghujung tahun. Bagi kita insan perhubungan, ini berarti sebuah tugas telah menanti. Seperti halnya masa lebaran, periode Angkutan Natal dan Tahun Baru atau disingkat Nataru merupakan hajat Kementerian Perhubungan menyelenggarakan transportasi yang selamat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Pada tahun ini, karena situasi pandemi telah kondusif, pemerintah tidak memberlakukan kebijakan pembatasan pelaku perjalanan, oleh karenanya patut diantisipasi terjadinya peningkatan jumlah mobilitas masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada periode Nataru.

Sebagai langkah koordinasi, Kementerian Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama sejumlah instansi terkait, diantaranya Kementerian PUPR, Polri, TNI, Kementerian Kesehatan, Kemenko Maritim dan Investasi, dan *stakeholder* terkait lainnya. Dalam rakor tersebut Menteri Perhubungan menekankan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan dan komunikasi kepada publik menjadi kunci sukses penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Selain itu, hal lain yang menjadi catatan saya adalah terkait dengan bagaimana upaya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik. Bahan bakar minyak yang selama ini kita gunakan untuk menghidupkan kendaraan bermotor, jumlahnya semakin berkurang dan suatu saat akan habis. Oleh karena itu sudah saatnya kita beralih menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai. Selain ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi, kendaraan listrik juga terbukti hemat dari segi biaya. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi kendaraan listrik dengan sejumlah kebijakan, antara lain dengan memberi intensif untuk kendaraan listrik dan memperbanyak jumlah SPKLU, agar semakin banyak orang menggunakan kendaraan listrik.

Pada kesempatan ini, saya pribadi dan juga mewakili institusi, mengucapkan Selamat Natal kepada umat Nasrani yang merayakannya. Dan selamat menyambut Tahun Baru untuk kita semua. Biarlah yang telah berlalu menjadi kenangan, hari ini menjadi kenyataan, dan hari esok menjadi harapan.

Akhir kata, saya sampaikan imbauan untuk selalu menjaga kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan, baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Bagi rekan-rekan yang harus bertugas di lapangan, saya sampaikan apresiasi dan terimakasih. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa keberadaan kita berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara tercinta. Tetap semangat dan tetap sehat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DRS. HENDRO SUGIATNO, M.M.





Foto Cover:

HMS DJPD/WBW

Sejumlah kendaraan listrik bersiap mengikuti Touring Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Jakarta - Bali. Kegiatan ini diberangkatkan dari Silang Monas, Jakarta, 7 November 2022.

PENANGGUNG JAWAB
Amirulloh

REDAKTUR PELAKSANA
Endy Irawan

REDAKTUR UTAMA
Pitra Setiawan
Nanang Rahardjo
Aznal

REDAKTUR
Ardian Sukmaji
Dinda Siahaan
Alvia Lilian
Hanna Suryadika

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI
M. Aulia Dharma
Herman Wibowo
Bayu Adi Saputro
Rinjani Pangestu

SEKRETARIAT
Bejo Sri Wahono
Ratna Syaka Aprilida
Bambang Widianto
Sari Hayu Hutami
Ely Rusnita
Yudha Kurniawan
Kurniadi Zaini
Didik Prasetyo
Rifai Dyan Armananta
Nolita
Rusdinal
M. Farid Ardiansyah
M. Fadil Imaddudin
Achmad Maulana
Achmad Nanang
Rosmala Damayanti
Reza Saputra
Nurfadilah Sinta Ningrum
Ade Yunita
Ardianto
Rina Noviana
Septriana Dia Areta
Virsa Rosadya

KONTRIBUTOR
Junedi Sembiring
Nurita Aprilianing Tyas
Marisa
Wahyu Arya Putra
Prisca Magdalena Samosir
Arief Eko Sumba
Cristian Andri Mardhani
Erlieka Affan
Ririn Scorviyanti
Rinto Mahendra Raharjo



Diterbitkan oleh:

Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Gedung Karya Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8

Jakarta Pusat 10110
Telp./Fax. : (021) 3506141

email : humas.hubdat@gmail.com

website : <http://hubdat.dephub.go.id/>

@hubdat151

ditjen perhubungan darat

@ditjen_hubdat

ditjen perhubungan darat

@ditjen_hubdat

Info Redaksi

Pembaca *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman,

Menjelang pergantian tahun, kita kembali disibukkan dengan penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru atau disingkat Nataru. Kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan pembatasan pelaku perjalanan diprediksi akan menimbulkan peningkatan jumlah mobilitas penumpang pada masa Nataru ini.

Para pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, *Newsletter* infoHUBDAT menyuguhkan Laporan Utama mengenai kesiapan dan pengendalian transportasi darat pada masa Nataru. Kemenhub mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru dengan melibatkan instansi dan *stakeholder* terkait.

Kemudian, kami sajikan pula liputan khusus mengenai kondisi sarana dan prasarana di wilayah kerja BPTD XXIV Maluku Utara. Seperti daerah kepulauan lainnya, Maluku Utara mengandalkan kapal penyeberangan sebagai moda transportasi sehari-hari yang menghubungkan pulau yang satu dengan yang lain. Tim liputan menjumpai seorang ibu yang bertugas sebagai syahbandar pembantu di Pelabuhan Penyeberangan. Bersama 4 wanita lainnya kami ulas mereka dalam artikel Wanita-Wanita Tangguh di Pelabuhan Penyeberangan.

Tak kalah menarik, artikel mengenai *Touring* Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai rute Jakarta - Bali dalam rangka mendukung perhelatan KTT G20. Kemenhub menyediakan 30 unit bus listrik medium untuk melayani mobilitas para delegasi dan peserta KTT G20. Ajang KKT G20 juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan masa depan.

Kami tampilkan pula tulisan tentang pengembangan *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi melalui skema KPBU. Sejumlah instansi menyatakan dukungannya pada proyek besar berkelas internasional ini. Masih terkait hal tersebut, kami suguhkan artikel mengenai BPLJSKB yang kini berubah status menjadi Badan Layanan Umum.

Selain itu, ada pula ulasan mengenai rencana pengoperasian angkutan lintas batas negara Indonesia - Timor Leste yang turut melengkapi edisi kali ini.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca sekaligus dalam infoSelintas. Di bagian akhir, kami sajikan rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian. (*)



daftar isi EDISI TRIWULAN 04 / 2022

Info Utama

04

KESIAPAN DAN PENGENDALIAN TRANSPORTASI DARAT JELANG NATARU

Pada angkutan Nataru kali ini, pemerintah tidak membatasi mobilitas seperti pada tahun sebelumnya. Karena itu, diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah pergerakan masyarakat dibanding tahun sebelumnya.

Info Khusus

08 BPTD XXIV Maluku Utara, Menyatukan Kepulauan dengan Kapal Penyeberangan

10 Mendukung Sail Tidore 2022 dengan Suka Cita

12 Wanita-wanita Tangguh di Pelabuhan Penyeberangan

14 Touring Kendaraan Listrik G20 Jakarta-Bali

16 Menhub Cek Bus Listrik Merah Putih

18 Bus Listrik Merah Putih Untuk G20

20 KTT G20 Jadi Ajang Sosialisasi Kendaraan Listrik

22 Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat Sinergikan Pusat dan Daerah

Info Sarana

24 Menekan Fatalitas Tabrak Belakang Truk

26 *Electric Vehicle Funday*, Sosialisasikan Kendaraan Listrik

28 BPLJSKB Kini Jadi Badan Layanan Umum

Info Prasarana

30 Dukungan Bagi Proyek *Proving Ground* Terbesar di Asia Tenggara

32 Terminal Wajib Beri Ruang Bagi UMKM

Info Angkutan

34 Kemenhub Siapkan ALBN Kupang - Dili

36 Dialog Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan dalam *Sustainable Transportation Forum*

Info TSDP

42 Optimalisasi Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Serta Pelabuhan Penyeberangan di Danau Toba

Info Lalu Lintas

38 Manajemen Lalu Lintas pada KTT G20 di Bali

Info Selintas

- 39 • Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Telah Perhatikan Kemampuan Pengusaha dan Masyarakat
- Sosialisasi Advokasi Hukum Menghadapi Gugatan PTUN
- Dirjen Hubdat Ajak Semua Pihak Wujudkan Keselamatan Jalan
- Menhub Tinjau Terminal Tipe A Leuwi Panjang Bandung
- Jelang Nataru, Kemenhub Instruksikan *Ramp Check* Seluruh Unit Bus
- Semiloka Keselamatan LLAJ Gaungkan Kendaraan yang Berkeselamatan
- Ditjen Hubdat Berikan Bantuan Bagi Korban Gempa Cianjur

Lensa Hubdat

- 43 Rekaman Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa

Di wilayah kepulauan, kapal penyeberangan menjadi moda transportasi sehari-hari untuk berpindah lokasi. Naik kapal penyeberangan di Maluku Utara layaknya naik angkutan perkotaan atau pun kereta rel listrik di Pulau Jawa.

Sebuah kendaraan truk sedang melintasi *rampdoor* KMP Tuna di Pelabuhan Penyeberangan Bastiong, Ternate, Maluku Utara, 8/11/2022. Foto: HMS DJPD/WBW



KESIAPAN DAN PENGENDALIAN TRANSPORTASI DARAT JELANG NATARU

“Saya mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas terminal yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan gunakan angkutan umum apabila ingin ke kota-kota lain. Sedangkan untuk perusahaan bus saya mengimbau kesiapan bus dan pengemudinya menjelang nataru tahun ini,” kata Dirjen Hendro.

Berkaca dari angkutan natal dan tahun baru sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno dalam tinjuannya hari Kamis (14/10) telah mempersiapkan prasarana yakni beberapa terminal seperti Terminal Tipe A Harjamukti Cirebon, Terminal Tipe A Tegal, Terminal Tipe A Bulupitu Purwokerto, dan Terminal Tipe A Bobotsari Purbalingga yang berpotensi mengalami lonjakan penumpang pada saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Dari hasil tinjauan di Terminal Harjamukti hari ini saya mengimbau untuk masyarakat fasilitas terminal yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan gunakan angkutan umum apabila ingin ke kota-kota lain. Sedangkan untuk perusahaan bus saya mengimbau kesiapan bus dan pengemudinya menjelang nataru tahun ini,” kata Dirjen Hendro.

Dirjen Hendro juga mengingatkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) beserta Polri dan TNI untuk dapat mengantisipasi lonjakan masyarakat yang akan melaksanakan liburan pada beberapa titik.



Dirjen Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, memimpin rapat persiapan Angkutan Nataru 2022/2023 di Terminal Harjamukti, Cirebon, 14/10/2022. Foto: HMS DJPD/MAD

Pada rapat tersebut, Dirjen Hendro mengharapkan saat natal dan tahun baru nanti diadakan pos terpadu yang diisi oleh berbagai instansi.

Menurut data dari Ditlantas Polda Jabar terdapat beberapa daerah rawan kemacetan yang menjadi perhatian Kementerian Perhubungan untuk bisa melakukan pendampingan pengamanan maupun arus

kendaraan dengan pihak kepolisian.

Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala BPTD Wilayah IX Jawa Barat, Denny Michels. Denny juga memaparkan pengendalian arus kendaraan bisa dilaksanakan dengan melakukan pembatasan waktu atau rekayasa lalu lintas.

Saat ini beberapa titik yang menjadi sorotan kemacetan



Dirjen Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno bersama jajaran meninjau Terminal Bulupitu, Purwokerto, 15/10/2022. Foto: HMS DJPD/MAD

yaitu Nagrek, Limbangan, dan Malangbong.

“Prediksi nataru akan melonjak pada saat *long weekend* hari Jum’at, Sabtu, dan Minggu. Begitupun arus balik diprediksi akan tersebar pada tanggal 26-27 Desember 2022,” imbau Denny.

Lebih lanjut lagi, Denny mengatakan jalur Pantura merupakan salah satu jalur alternatif yang masih menjadi idaman masyarakat untuk melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, UPPKB Losarang dan UPPKB Balonggandu akan disulap menjadi *rest area* bagi para pemudik melakukan istirahat.

Namun demikian, Dirjen Hendro meminta masyarakat dan pemerintah untuk bekerjasama dengan baik sehingga natal 2022 dan tahun baru 2023 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dirjen Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno bersama jajaran meninjau progres pembangunan Terminal Bobotsari, Purbalingga, 15/10/2022. Foto: HMS DJPD/MAD



Selanjutnya Dirjen Hendro melakukan tinjauan ke Terminal Tegal, Terminal Bulupitu dan Terminal Bobotsari.

Pada rapat di Terminal Bulupitu, Dirjen Hendro didampingi oleh Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwokerto dan Polres Purwokerto juga membahas persiapan angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 termasuk kecelakaan akibat kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL), uji KIR, dan konversi kendaraan listrik.

Konsep ke depan untuk angkutan umum Kemenhub telah mengadakan aturan konversi kendaraan listrik. Beberapa SPKLU juga telah dibangun melalui kerjasama dengan PLN. Dengan manajemen yang semakin tahun semakin baik ini masyarakat diharapkan bisa berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum.

Di kesempatan yang sama, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah menjelaskan beberapa posko dan kendaraan pendukung akan dibangun menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.(*)

Persiapan Angkutan Nataru **KOORDINASI & KOMUNIKASI JADI KUNCI SUKSES**

Pada angkutan Nataru kali ini, pemerintah tidak membatasi mobilitas seperti pada tahun sebelumnya. Karena itu, diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah pergerakan masyarakat dibanding tahun sebelumnya.



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Lintas Instansi, Kantor Pusat Kemenhub Jakarta, 13/12/2022. Foto: HMS DJPD/BYU

Koordinasi antar pemangku kepentingan dan komunikasi kepada publik menjadi kunci sukses penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Hal ini diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memimpin Rapat Koordinasi

(Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama Kementerian/Lembaga, operator transportasi, dan pihak terkait lainnya, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (13/12).

“Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, kita harapkan penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru berjalan dengan selamat, aman, nyaman dan juga sehat,” ujar Menhub.

Menhub pun menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait. Kemenhub berkoordinasi intensif dengan Polri, TNI, Pemda, dan operator terkait, untuk menyiapkan langkah-langkah penanganan, diantaranya manajemen rekayasa lalu lintas di ruas rawan kemacetan, menangani pasar tumpah, melakukan penambahan rest area, memastikan pasokan BBM di jalur utama, melakukan sosialisasi secara intensif kepada petugas dan masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, memastikan aspek keselamatan dan keamanan transportasi, dan pengawasan penerapan prokes.

Pada angkutan Nataru kali ini, pemerintah tidak membatasi mobilitas. Karena itu, diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah pergerakan masyarakat dibanding tahun sebelumnya.

“Kita harus memperhatikan tren mobilitas masyarakat yang mengalami peningkatan karena bersamaan dengan waktu libur sekolah. Momen ini juga akan dimanfaatkan masyarakat untuk liburan ke tempat wisata, dan juga tidak adanya pembatasan mobilitas, sehingga menyebabkan pergerakannya diprediksi cenderung meningkat dari biasanya,” ucap Menhub.

Kendati tidak ada pembatasan, Menhub menekankan kepada seluruh pihak terkait untuk tetap mengedepankan aspek kesehatan, selain keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, sesuai aturan syarat perjalanan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid 19 dan Instruksi Mendagri. Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat di masa libur nataru yang dilaku-

kan Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub, diprediksi potensi pergerakan masyarakat yang bepergian pada Nataru tahun ini yaitu 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 44,17 juta orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang diprediksi sebanyak 19,9 juta orang.

Dalam rakor ini, sejumlah hal lainnya yang disampaikan Menhub diantaranya yakni: meminta dukungan Korlantas untuk memberi pengawasan khusus kepada pengendara sepeda motor terkait aspek keselamatan. Kemudian, melakukan pemantauan terhadap harga tiket transportasi publik, khususnya pesawat udara.

Selanjutnya, mengantisipasi pergerakan penumpang dan kendaraan di dua titik krusial yaitu di Tol Jakarta - Semarang dan di Pelabuhan Penyeberangan Merak - Bakauheni, mengawasi pergerakan penumpang kereta api khususnya di rute favorit, memaksimalkan rotasi operasional pesawat, melakukan *ramp check* khususnya pada angkutan wisata yang rawan terjadi kecelakaan dan melakukan penegakkan hukum bagi operator yang melanggar, serta mengantisipasi cuaca ekstrem.

Untuk meningkatkan koordinasi, Kemenhub akan membentuk Pusat Koordinasi Nasional (POSKO) Penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan melibatkan instansi lintas sektoral terkait.

Dalam rakor, seluruh sektor transportasi dan juga TNI, Polri dan lembaga lainya diberi kesempatan menyampaikan rencana dan dukungan, dalam melancarkan penyelenggaraan angkutan selama liburan nataru.

Hadir dalam rakor ini antara lain: Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Irjen (Pol) Firman Shantyabudi; Ketua KNKT



Dari kiri ke kanan: Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno, Dirjen Bina Marga KemenPUPR Hedy Rahadian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kakorlantas Polri Firman Shantyabudi usai penandatanganan kesepakatan bersama Pengaturan Lalu Lintas Jalan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Jakarta, 13/12/2022. HMS DJPD/BYU

Soerjanto Tjahjono; Kepala BMKG Dwikorita Karnawati; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yohanes Baptista Satya Sananugraha; Sekretaris Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso; Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Rachmat Kaimudin; Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Armed Wijaya; dan sejumlah perwakilan dari TNI, Polri, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian dan Lembaga; para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian dan Lembaga; dan Direktur BUMN/Swasta di sektor transportasi dan navigasi.

Pantauan Pos Lalu Lintas Gadog

Dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno bersama Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi meninjau Pos Lalu Lintas Gadog, Bogor, Jawa Barat pada Senin (5/12).

“Pengamanan tahun baru itu setiap tahun, namun tantangan yang kita hadapi juga berbeda setiap tahun-

nya. Tindakan yang kita lakukan tidak bisa seperti yang biasa-biasanya” kata Dirjen Hendro.

Kawasan Puncak, Bogor memang menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi sehingga diperlukan penanganan secara cepat dan tepat. “Koordinasi harus tetap dijalankan, manfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada di sekitar Bogor, saya kira Dinas Perhubungan di sini memiliki peralatan yang dapat dimanfaatkan dengan baik,” tutur Dirjen Hendro.

Selain itu, Ditjen Perhubungan Darat juga akan melakukan pembatasan angkutan barang saat Nataru. “Mulai hari Kamis tanggal 22 Desember nanti akan dilakukan pembatasan angkutan barang kecuali kendaraan yang mengangkut BBM dan bahan pokok,” tutur Dirjen Hendro.

Lebih lanjut Dirjen Hendro berharap dengan adanya persiapan awal ini Angkutan Nataru akan dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Dirinya menegaskan agar jajarannya dapat terus mengkomunikasikan informasi terbaru kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Nataru, sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan atau pun merencanakan perjalanan.*

BPTD XXIV MALUKU UTARA Menyatukan Kepulauan dengan Kapal Penyeberangan

Oleh: Tim Liputan infoHUBDAT

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XXIV merupakan kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Keberadaannya mampu menembus konektivitas sisi terluar dan terjauh Provinsi yang berada di timur Indonesia ini, yang terdiri dari kepulauan.

Menapaki Maluku Utara, kita akan terlebih dahulu diantar ke Ternate, salah satu pintu masuk utama ke Provinsi itu. Untuk mencapai

Ibukota Provinsinya di Sofifi, maka harus menyeberang dengan kapal ferry sekira satu jam perjalanan.

Provinsi yang merupakan kawasan kepulauan ini mengandalkan kapal penyeberangan sebagai moda transportasi sehari-hari untuk berpindah lokasi. Naik kapal penyeberangan di Maluku Utara layaknya naik angkutan perkotaan atau kereta rel listrik di Pulau Jawa.

Kepala BPTD XXIV Lilik Handoyo menyampaikan, saat ini pihaknya memiliki 167 pegawai yang siap mengawal konektivitas di Maluku Utara (Malut) dengan optimal. "Jumlah tersebut sebagian besar ASN (aparatur sipil negara) dan sebagian lainnya honorer," ungkapnya di Ternate beberapa waktu lalu.

Adapun susunan organisasi di BPTD XXIV yakni Kepala Balai, dibantu Seksi Transportasi Jalan (Kasi: Ari Prabowo), Seksi Sarana Prasarana SOP Komersial dan Perintis (Kasi: Abdul Majid), dan Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Kasi: Hamka Husein), serta Kepala Seksi Tata Usaha, Andreas.

Mereka juga memiliki lima Satuan Pelayanan (Satpel). Pertama Satpel Pelabuhan Penyeberangan

wilayah I dengan Kepala yakni Ridwan Kader, Satpel Pelabuhan Penyeberangan wilayah II dipimpin Fachry A Radjiloen, Satpel Pelabuhan Penyeberangan wilayah II digawangi M. Abduh Salama. Satpel Pelabuhan Penyeberangan wilayah IV dibawah Akbar Arifin, dan Satpel Pelabuhan Perintis Daruba dengan penanggung jawab Muhammad Takdir.

Lilik menyebutkan, BPTD XXIV bertanggungjawab atas penyeberangan komersil dan perintis di 31 pelabuhan penyeberangan serta angkutan jalan perintis. Hal yang paling utama dalam menjalankan tugas di wilayah Maluku Utara ini adalah menjaga keselamatan dan keamanan di penyeberangan dan angkutan jalan.

"Dengan penugasan saat ini di bidang angkutan penyeberangan dan angkutan jalan perintis, kami juga tengah berupaya agar ke depannya BPTD XXIV dapat juga mengelola Jembatan Timbang (UPPKB) untuk menegakkan keselamatan pada angkutan barang di jalan raya," ungkapnya. Tugas yang menjadi prioritas di BPTD ini adalah angkutan penyeberangan. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pengawasan dan penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban.

Sebagai penanggungjawab keselamatan, maka di tiap pelabuhan penyeberangan, pihaknya menugaskan Syahbandar Pembantu yang bertugas menetapkan Surat Perintah Berlayar (SPB) dan juga mengawasi kelaikan kapal penyeberangan yang beroperasi di wilayah kerjanya yang berjumlah 31 pelabuhan.



Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Maluku Utara, Lilik Handoyo

Dari 31 pelabuhan itu, menurut Lilik, enam diantaranya melayani komersil dan 25 lainnya perintis. "Dari jumlah pelabuhan yang ada, pengelolaan BPTD XXIV sebanyak dua pelabuhan penyeberangan, sisanya dikelola oleh Pemda setempat dan PT. ASDP Indonesia Ferry," tuturnya.

Saat ini pelabuhan yang tersibuk adalah di Pelabuhan Bastiong. Setiap harinya melayani tiga rute yakni Bastiong-Rum, Bastiong-Sofifi, dan Bastiong-Sidangoli. Pada penyeberangan tiga rute itu ditempuh jarak pendek yakni durasi antara 15 menit-1 jam saja. Sedangkan dalam setiap minggunya di pelabuhan yang dikelola ASDP itu kata dia melayani penyeberangan jarak jauh yakni Bastiong-Bitung dan Bastiong-Batang Dua. Pada penyeberangan jarak jauh ini banyak pengguna jasa yang memanfaatkan untuk mengangkut hasil bumi seperti Kopra, Cengkeh, dan Pala.

Sementara itu, untuk angkutan jalan perintis menurut Lilik saat ini di wilayah BPTD XXIV hanya satu rute yang melintasi Tobelo-Galela-Saluta menggunakan bus DAMRI berkapasitas 30 seat sebanyak 15 armada. "Bus perintis ini sangat dinanti oleh masyarakat yang akan bermobilitas membawa hasil bumi dan lain sebagainya," ujarnya.

Dengan adanya subsidi kata dia, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang dilalui bus perintis ini karena tidak ada layanan komersil yang masuk. Masyarakat memanfaatkan layanan bus perintis itu, khususnya agar bisa menjual hasil kebun ke kota dan balik membawa barang dagangan serta kebutuhan pokok mereka.

Dana Alokasi Khusus untuk 13 Pelabuhan

Meski hanya memiliki satu pelabuhan penyeberangan yakni Daruba yang dikelola langsung oleh BPTD XXIV, namun pihaknya tetap memberi perhatian kepada pelabuhan penyeberangan milik Pemda setempat. Perhatian yang diberikan di antaranya dengan menyerahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diserahkan untuk 13 pelabuhan.

DAK tersebut dijelaskan Lilik diberikan kepada pelabuhan penyeberangan untuk dilakukan perbaikan dan pemolehan agar tampak lebih bagus lagi dari kondisi yang sudah eksisting.

Dia juga berharap jumlah DAK dapat terus digulirkan untuk meningkatkan kualitas layanan di pelabuhan penyeberangan milik Pemda yang dalam hal keselamatan tetap dipegang oleh BPTD XXIV melalui keberadaan Syahbandar Pembantu. (Tim)



Mendukung Sail Tidore 2022 dengan Suka Cita



Perhelatan internasional Sail Tidore 2022 telah dinantikan sejak lama. Maklum saja, tadinya akan diselenggarakan pada tahun 2021 dan harus mundur lantaran terhalang pandemi Covid-19.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XXIV wilayah Maluku Utara pun tak lepas dari rencana kegiatan yang menghadirkan peserta dari berbagai negara itu.

Di bawah kepanitiaan yang dipimpin Kementerian Perdagangan,

BPTD XXIV yang merupakan kepanjangan tangan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, mendukung dengan suka cita demi kesuksesan acara.

Kepala BPTD Lilik Handoyo mengemukakan, berbagai persiapan dukungan telah dilakukan pihaknya.

“Dari sisi transportasi, kami mendukung kendaraan Hiace berkapasitas 15 penumpang sebanyak 30 armada yang siap digunakan untuk mobilitas di Tidore selama Sail,” jelas Lilik belum lama ini.

Pihaknya juga menyiapkan sejumlah dukungan kelengkapan rambu, marka jalan putih dan kuning, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) *Solar cell*, *Guardrail* tipe 2, dan LPPJ.

Uraianya adalah rambu sebanyak 152 buah, 10.305 Marka Kuning, 39.228 Marka Putih, 14.788 *Solar Cell*, dan *Guardrail* tipe 2 sebanyak 88 unit.

Menjelang dan selama penyelenggaraan Sail Tidore 24-29 November 2022, menurutnya, frekuensi layanan angkutan penyeberangan ditambah. Hal ini guna mendukung dan mempermudah masyarakat yang akan menuju ke lokasi acara Sail Tidore di Kepulauan Tidore.

Untuk trayek Bastiong-Rum misalnya, bila pada waktu reguler ini melayani empat kali trip dan Rum-Bastiong juga empat kali, maka pada kegiatan Sail Tidore menjadi masing-masing delapan kali trip dalam sehari dari pukul 07.00-21.00 WIT.

“Pelabuhan Penyeberangan Bastiong merupakan pintu gerbang bagi yang akan datang ke Tidore melalui Rum. Waktu tempuh pelayarannya hanya sekitar 15 menit saja menggunakan kapal RoRo,” ungkap Lilik.

Sedangkan dari Pelabuhan Penyeberangan Sofifi ke Dowora (lebih dekat menuju lokasi Sail Tidore) selama pelaksanaan acara tetap melayani satu trip yakni pukul 07.00 WIT dan kembali Dowora-Sofifi pada pukul 14.00 waktu setempat.

Sebagai tambahan, pada perhelatan Sail Tidore ini tersedia 1.486 kamar penginapan dan hotel sebagai akomodasi pengunjung. Sedangkan hotel untuk tamu VIP dikoordinir oleh pihak Pemerintah Provinsi. (Tim)

Pelabuhan Penyeberangan Rum, Tidore, 8/11/2022. Foto: HMS DJPD/WBW

Keren, ada lima Syahbandar Pembantu wanita yang bertugas di Pelabuhan Penyeberangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XXIV Maluku Utara (Malut) Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Biasanya tugas seperti itu diemban oleh kalangan pria, namun BPTD XXIV ini mampu memberdayakan wanita dengan kompetensi yang mumpuni.

Ya, mereka bertugas di empat pelabuhan penyeberangan yang berbeda. Satu di Pelabuhan Penyeberangan Bastiong yakni Kartina A Domu dan dua di Pelabuhan Rum, Tidore Nuryan Samad dan Lily Sultani.

Selanjutnya di Pelabuhan Makian Fadhilah Hakim dan di Pelabuhan Penyeberangan Dowora Fahria.

Syahbandar Pembantu Kartina mengemukakan, meski meyakini setiap penugasan haruslah siap dikerjakan, namun tetap saja ada hal yang benar-benar menjadi fokus perhatian.

“Tantangan utama yang harus dihadapi adalah keselamatan pelayaran penyeberangan. Kita harus tegas dalam menentukan apakah Surat Perintah Berlayar (SPB) dapat diterbitkan atau tidak sebelum keberangkatan kapal,” ujar Kartina.

Tentu saja dengan melakukan pengecekan berkas dan bila perlu turun langsung ke lapangan. Kondisi cuaca juga dicek melalui laporan rutin BMKG, apakah aman untuk berlayar atau tidak.

Selain itu juga mengecek dokumen kapal apakah masih berlaku atau sudah melewati masa kadaluarsa.

“Semua ini semata-mata untuk mewujudkan keselamatan dan *zero accident*,” ungkapnya.



Terdapat lima Syahbandar Pembantu wanita yang bertugas di Pelabuhan Penyeberangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XXIV Maluku Utara (Malut) Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Kartina A Domu, Syahbandar Pembantu di Pelabuhan Penyeberangan Bastiong, Ternate, Maluku Utara. Foto: HMS DJPD/WBW

Bahkan di sela kesibukannya pun dia menyempatkan untuk menerima pesanan kue secara online.

“Meski saya lelah tetapi membuat kepuasan tersendiri bagi saya saat bisa menjalankan hobi mengolah kue,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Syahbandar Pembantu Lily yang bertugas di Pelabuhan Penyeberangan Rum.

“Pengguna jasa dan cuaca adalah tantangan,” tegasnya.

Untuk pengguna jasa, tantangannya adalah pada saat terjadi keterlambatan kedatangan atau keberangkatan kapal penyeberangan yang tidak sesuai jadwal.

Dengan kebijaksanaan, Lily menghadapi mereka dan memberikan pengertian alasan terjadinya keterlambatan.

Fahria pun tak kalah semangat, sebagai Syahbandar Pembantu di Pelabuhan Penyeberangan Dowora.

Setiap hari dia berangkat dari Pelabuhan Bastiong ke Rum dan dilanjutkan dengan perjalanan darat menggunakan sepeda motor.

“Dari Pelabuhan Penyeberangan Rum, kurang lebih 20-25 menit saya berkendara untuk sampai ke Dowora,” jelasnya.

Area yang ditempuh menyusuri Tidore pun cukup menantang meski jalan sudah mulus. Dia akan bertemu jalan menurun dan menanjak yang cukup memacu adrenalin itu. Hebatnya sepak terjang para srikandi Malut ini bisa menjadi contoh positif bagi insan wanita transportasi yang berjuang mewujudkan keselamatan. (*)

Wanita-Wanita Tangguh di Pelabuhan Penyeberangan

Nuryan yang sudah tiga tahun bertugas di BPTD XXIV, saat ini diamanahkan menjadi Syahbandar Pembantu di Pelabuhan Rum, Tidore.

“Saya sudah lima bulan bertugas di sini. Sebelumnya di Pelabuhan Bastiong dengan jabatan sama,” ujar Nuryan.



Lily Sultani, Syahbandar Pembantu Pelabuhan Penyeberangan Rum, Tidore



Nuryan Samad, Syahbandar Pembantu Pelabuhan Penyeberangan Rum, Tidore



Fadhilah Hakim, Syahbandar Pembantu Pelabuhan Penyeberangan Makian, Halmahera Selatan



Fahria, Syahbandar Pembantu Pelabuhan Penyeberangan Dowora, Tidore

Untuk pelaksanaan tugas dibagi dua hari masuk dua hari libur, jadi dalam satu minggu empat hari dalam mengawal keselamatan penyeberangan.

Ibu tiga anak ini mengaku berusaha membagi waktu antara pekerjaan dan sebagai ibu rumah tangga.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas sekitar 20 mobil listrik yang mengikuti kegiatan *touring* kendaraan listrik dari Jakarta menuju Bali, pada Senin (7/11) di Silang Monas, Jakarta.

Touring kendaraan listrik Jakarta-Bali yang diinisiasi oleh Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat ini dilakukan untuk mengkampanyekan penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan mengenalkan kendaraan listrik kepada masyarakat. Ini merupakan kegiatan kali kedua, setelah sebelumnya juga menggelar *touring* kendaraan listrik Jakarta-Jambi pada awal 2022.

“Saya minta para peserta *touring* nantinya dapat menceritakan pengalamannya menggunakan kendaraan listrik. Apa manfaatnya, keuntungannya, dan bagaimana masa depannya, agar diceritakan apa adanya. Ini akan menarik minat masyarakat untuk mengenal kendaraan listrik,” ujar Menhub.

Menhub mengatakan, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk mempercepat implementasi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia dengan target 2 juta kendaraan listrik beroperasi pada 2025.

“Pemerintah juga melakukan upaya agar kendaraan listrik ini mendapatkan subsidi sehingga harganya semakin ekonomis, dan akan semakin menarik minat masyarakat untuk menggunakannya,” tutur Menhub.

Menhub menyampaikan apresiasinya kepada sejumlah produsen otomotif, komunitas, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan *touring* ini.

Lebih lanjut, dalam mendukung penyelenggaraan KTT G20 di Bali,



Pelepasan *Touring* Kendaraan Listrik Jakarta - Bali di Silang Monas, Jakarta, 7/11/2022. Foto: HMS DJPD/WBW

TOURING KENDARAAN LISTRIK G20 JAKARTA-BALI

Dalam rangka memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kendaraan ramah lingkungan serta salah satu bentuk dukungan terhadap pelaksanaan KTT G20, Kementerian Perhubungan menyuguhkan program *Touring* Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang disuguhkan dalam bentuk perjalanan sejauh 1.250 km dimulai dari Jakarta menuju ke Bali.

pemerintah telah menyiapkan angkutan massal berbasis listrik untuk mendukung mobilitas para delegasi dan peserta kegiatan G20. Salah satunya yaitu menyediakan sebanyak 30 bus listrik buatan dalam negeri. “Kami berkolaborasi dengan Diknas, universitas, serta asosiasi dan pelaku otomotif untuk membuat bus listrik. Rencananya setelah digunakan di Bali, bus listriknya akan digunakan sebagai layanan angkutan massal perkotaan Buy The Service (BTS) di Surabaya

dan Bandung,” ucap Menhub. Dalam laporannya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menyampaikan, “Kegiatan *touring* kendaraan listrik Jakarta - Bali ini merupakan rangkaian acara pameran G20 di Nusa Dua Bali, yang merupakan *side-event* KTT G20 yang mengangkat tema “*Future SME's Village*”. Program ini sebagai langkah nyata mendukung salah satu isu penting yaitu transisi energi berkelanjutan, selain itu ikut membantu dalam



Sebanyak 20 kendaraan listrik mengikuti *Touring* Kendaraan Listrik Jakarta - Bali 2022, termasuk diantaranya bus listrik. Untuk mendukung penyelenggaraan KTT G20, Ditjen Perhubungan Darat menyiapkan bus listrik sebagai sarana transportasi para delegasi dan peserta KTT G20.

menyosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Touring ini berlangsung selama 5 hari, melewati rute Jakarta - Cirebon - Semarang - Surakarta - Surabaya - Jember - Bali sepanjang 1.250 km. Dalam perjalanannya, peserta *touring* akan singgah di beberapa kota dan melakukan sosialisasi keselamatan berkendara di antaranya di kota Surakarta dan Jember.

Saat *finish* di Bali pada 11 November 2022, kegiatan akan dilanjutkan dengan pameran kendaraan listrik di Bali memanfaatkan momen Presidensi Indonesia dalam G20, sebagai wujud komitmen dukungan Indonesia terhadap dekarbonisasi sektor transportasi dan transisi energi berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Touring diikuti 20 unit kendaraan yang berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, PT PLN (Persero), PT Hyundai Motor Indonesia, PT Nissan Motor Distributor Indonesia, PT Toyota Astra Motor, PT Sokonindo Automobile (DFSK), PT SGMW

Motors Indonesia (Wuling), PT Blue Bird Tbk, PT Sinar Armada Globalindo, serta PT Mobilindo Armada Cemerlang (Zhongtong).

Turut hadir pada Pelepasan *Touring* Kendaraan Listrik Jakarta-Bali, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

Novie Riyanto, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Ketua Umum Perkindo Moeldoko, Direktur Regident Korlantas Polri Yusri Yunus, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, serta perwakilan PT PLN (Persero) dan PT Jasa Raharja.*



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, didampingi Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, dan pengamat otomotif Fitra Eri, serta pejabat terkait lainnya melepas *Touring* Kendaraan Listrik Jakarta-Bali, di Silang Monas, Jakarta, 7/11/2022. Foto: HMS DJPD/WBW

MENHUB CEK BUS LISTRIK MERAH PUTIH

Menhub mengapresiasi para pihak yang telah mewujudkan harapan untuk menjadikan bus listrik ini sebagai pendukung kelancaran mobilitas para delegasi dan peserta G20.

Sepekan jelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek sarana transportasi bus listrik merah putih, yang akan digunakan sebagai angkutan pengumpan (*shuttle*) untuk melayani para delegasi dan peserta KTT G20. Menhub ingin memastikan operasional bus listrik buatan dalam negeri tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Saya menjajal bus listrik karya anak bangsa, hasil kolaborasi antara Kemenhub, Kemenristek Dikti, INKA, dan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Tingkat komponen dalam negeri bus listrik ini sudah lebih dari 50 persen. Ini merupakan hasil perjuangan kita, dan menjadi kebanggaan kita di momen G20 ini,” ujar Menhub, di Bali, Kamis (10/11).

Menhub mengapresiasi para pihak yang telah mewujudkan harapan untuk menjadikan bus listrik ini sebagai pendukung kelancaran mobilitas para delegasi dan peserta G20.

“Saya bangga dengan apa yang sudah dilakukan. Bahwa jika ada yang belum maksimal, kita harus belajar dan tingkatkan lagi. Karena Pak Presiden menyampaikan kita harus mencoba. Insha Allah upaya

ini bisa memberikan makna yang baik bagi bangsa,” tutur Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, bus listrik yang digunakan pada event G20 ini nantinya akan digunakan sebagai angkutan massal perkotaan di kota Bandung, Surabaya, dan juga Bali, melalui program buy the service (BTS) dari Kemenhub, yang nantinya akan dioperasikan oleh DAMRI.

Sebanyak 30 unit bus listrik merah putih yang terdiri dari bus sedang dan besar ini, akan beroperasi diantaranya di kawasan Nusa Dua, daerah Sawangan, Samabe, dan kawasan *venue* KTT G20 Bali. Adapun jadwal operasional yang direncanakan untuk bus listrik tersebut adalah pada 11 - 17 November 2022, dengan jam operasional dari pukul 06.00 WITA hingga pukul 22.00 WITA.

Selain bus Merah Putih, bus listrik juga didatangkan dari berbagai pihak seperti: Universitas Indonesia, dan sejumlah produsen otomotif dalam negeri. Total bus listrik yang beroperasi untuk melayani mobilitas KTT G20 sebanyak 41 unit, terdiri dari bus sedang dan besar.

Penyediaan kendaraan listrik pada event G20 ini sebagai bukti komitmen Indonesia untuk mewujudkan transisi energi dari fosil ke energi



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencoba bus listrik yang akan digunakan sebagai angkutan *shuttle* untuk melayani para delegasi dan peserta KTT G20 di Bali, 10/11/2022. Foto: BKIP/Christanto

baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan, sebagai upaya bersama negara-negara di dunia untuk mengatasi krisis energi dan menangani perubahan iklim.

Turut hadir dalam peninjauan Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno, Dirut Perum Damri Setia N. Milatia Moemin, dan perwakilan dari PT INKA.

Simulasi Bus Listrik Untuk G20, Pastikan Pelayanan Berjalan Baik

Kementerian Perhubungan menggelar simulasi pergerakan bus listrik untuk mendukung mobilitas para delegasi dan peserta G20, bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait yakni Kemlu, Kemenkominfo, serta Kemenkomarves. Simulasi ini dilakukan untuk memastikan pelayanan bus listrik pada saat penyelenggaraan KTT G20 berjalan dengan baik dan lancar.

dari Bali International Convention Center ke Apurva, GWK, dan Tahura Mangrove untuk para wartawan/media peliput kegiatan G20. Untuk delegasi, sebanyak 12 bus listrik akan melayani pergerakan menuju ke lokasi acara, mulai pukul 06.00 s.d. 07.00 WITA dari BNDCC dan Lagoon ke Apurva, dengan *headway* atau waktu tunggu antarkedatangan bus antara 5 s.d. 10 menit sekali. Untuk bus listrik ukuran sedang dapat menampung sebanyak 19 orang dan 1 pengemudi, sementara bus listrik ukuran besar memiliki kapasitas duduk 50 orang penumpang yang terdiri dari 26 *seat*, 23 *standing*, dan 1 *driver*.

“Selain itu kami telah menyiapkan bus listrik untuk pelayanan dari Bandara Ngurah Rai ke kawasan Nusa Dua, Bali,” tutur Sesjen Novie.

Penyediaan bus listrik untuk mendukung Presidensi Indonesia pada G20 berasal dari sejumlah pihak, di antaranya yakni: Bus Listrik Merah Putih dari Kemenhub, Kemenristekdikti, PT INKA dan sejumlah perguruan tinggi, Universitas Indonesia, PT Indika Energi (Foxtron), PT Tentrem Sejahtera, PT Sinar armada Globalindo, PT Mobilindo Armada Cemerlang, dan PT Mobil Anak Bangsa. (*)

“Hari ini, Sabtu (12/11) kami juga telah menggelar rapat koordinasi yang dipimpin bapak Menteri Perhubungan. Kami telah melakukan sejumlah persiapan dan koordinasi untuk pengaturan operasional dari bus listrik yang totalnya berjumlah 41 unit baik bus sedang maupun bus besar,” demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto, di Bali.

Novie menjelaskan, selain akan melayani para delegasi dari negara-negara yang diundang, bus listrik juga melayani tim panitia serta wartawan peliput kegiatan G20. “Bus listrik akan melayani pergerakan dari satu titik ke titik lainnya di Bali,” ujarnya.

Rute yang dilayani yaitu: dari Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) - Apurva Kempinski Bali

dan Lapangan Lagoon - Apurva Kempinski Bali untuk para delegasi. Kemudian, dari Intercontinental Jimbaran ke Apurva untuk para panitia (Tim Sherpa). Serta,



Simulasi pergerakan bus listrik untuk mendukung mobilitas para delegasi dan peserta KTT G20 di Bali, 12/11/2022. Foto: BKIP

BUS LISTRIK MERAH PUTIH UNTUK G20

Menteri Perhubungan mengapresiasi kolaborasi Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Pelaku Industri pada peluncuran Bus Listrik Merah Putih yang digunakan untuk melayani para delegasi dan peserta KTT G20 di Bali.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, pada Minggu (13/11), secara resmi meluncurkan Bus Listrik Merah Putih yang akan digunakan untuk melayani para delegasi dan peserta KTT G20 di Bali.

Bus listrik ini merupakan hasil kolaborasi antarunsur pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku industri, yaitu: Kementerian Perhubungan, Kemendikbudristek Dikti, Kementerian BUMN, PT Industri Kereta Api (INKA), serta konsorsium sejumlah perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (UNAIR), serta Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar.

Pada kesempatan tersebut Menhub mengapresiasi Kemendikbudristek yang turut melibatkan para mahasiswa sejumlah perguruan tinggi dalam membangun bus listrik karya anak bangsa, yang tingkat komponen dalam negerinya sudah mencapai 50 persen lebih.

“Terima kasih kepada Mas Menteri Nadiem yang telah memberikan dukungan membiayai riset yang dilakukan para mahasiswa dalam pembuatan bus listrik ini. Riset menjadi kunci bagaimana kita membuat komponen kendaraan listrik buatan dalam negeri yang biayanya lebih murah, kualitasnya baik, dan daya jelajah yang tinggi,” ujar Menhub.

Kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, akan mampu mempercepat implementasi penggunaan kendaraan listrik secara masif di Indonesia.



Bus Listrik Merah Putih produksi PT. INKA digunakan sebagai sarana transportasi selama penyelenggaraan KTT G20 di Bali, 13/11/2022. Foto: HMS DJPD/TOL



Menhub Budi Karya Sumadi bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim, pada Minggu (13/11), secara resmi meluncurkan Bus Listrik Merah Putih yang akan digunakan untuk melayani para delegasi dan peserta KTT G20 di Bali. Foto: HMS DJPD/TOL

Lebih lanjut Menhub berharap, dengan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, akan mampu mempercepat implementasi penggunaan kendaraan listrik secara masif di Indonesia. “Jangan berhenti di sini, kita lakukan terus riset secara mendalam,” tutur Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan, Bus Listrik Merah Putih merupakan hasil karya kolaborasi anak bangsa yang patut diapresiasi. Menurutnya, kolaborasi semacam ini dapat menjadi contoh dalam melakukan suatu inovasi-inovasi kedepannya. “Tidak ada ego sektoral. Universitas terbaik meredakan ego masing-masing

untuk berkolaborasi membentuk konsorsium,” ucapnya.

Nadiem mengungkapkan, KTT G20 menjadi momentum Indonesia untuk menunjukkan keunggulannya. “Di G20 ini, tampak sekali di panggung dunia, kita mampu menghasilkan karya yang datang langsung dari akademisi dan mahasiswa kita,” katanya.

Kehadiran Bus Listrik Merah Putih menjadi kebanggaan bersama dalam menyukseskan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 dan merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk mendukung upaya transisi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Setelah perhelatan KTT G20, Bus Listrik Merah Putih nantinya akan digunakan sebagai angkutan

massal perkotaan di kota Bandung, Surabaya, dan juga Bali, melalui program *buy the service* (BTS) dari Kemenhub, yang akan dioperasikan oleh DAMRI.

Untuk mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik secara massal di Indonesia dan memanfaatkan momentum G20, Kemenhub juga menggelar pameran kendaraan listrik, yang berlangsung di Bali Art Collection, Nusa Dua Bali. Pameran yang digelar pada 12-16 November 2022 tersebut merupakan puncak dari kegiatan touring kendaraan listrik Jakarta-Bali, yang dilepas di Monas pada Senin (7/11). Pameran tersebut diikuti perusahaan kendaraan listrik, penyedia stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), bengkel konversi, serta beberapa universitas.*

Kegiatan KTT G20 yang masih berlangsung hingga 16 November 2022, dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sebagai wadah untuk melakukan sosialisasi masif mengenai kendaraan listrik.

Sejak pekan lalu pada Senin (7/11), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan *touring* Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dari Jakarta hingga Bali. Dengan menggandeng sejumlah pemangku kepentingan seperti swasta dan BUMN, Ditjen Hubdat menggelar Sosialisasi Kendaraan Listrik di kota-kota yang disinggahinya seperti Solo (8/11) dan Jember (9/11) hingga akhirnya tiba di Bali pada 10 November lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno pada Minggu (13/11) menjelaskan bahwa hingga hari ini pihaknya tetap aktif menggelar *talkshow* pada Pameran G20 di Nusa Dua, Bali yang merupakan *Expo Side Events* KTT G20 dengan tema *Future SMEs Village*. Hal ini disebutkannya sebagai bentuk kampanye aktif untuk mempromosikan kendaraan listrik di kalangan masyarakat umum.

KTT G20 JADI AJANG SOSIALISASI KENDARAAN LISTRIK

Tren perkembangan jumlah kendaraan listrik di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Banyak produsen lokal yang sudah memproduksi kendaraan listrik. Pemerintah berupaya mendorong penggunaan kendaraan listrik termasuk dengan memberikan insentif.

“Tren perkembangan kendaraan listrik di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Saya mengapresiasi banyak produk-produk lokal yang sudah memproduksi kendaraan listrik. *Charging* dari produk lokal juga sudah banyak, karena itu kita mendorong terus termasuk

konversi motor (berbahan bakar fosil ke listrik). Saat ini bahkan sedang dirumuskan juga insentif kendaraan listrik sehingga harganya akan turun dan ekosistem kendaraan listrik segera terbangun,” demikian dijabarkan Dirjen Hendro.

Menurutnya, kendaraan listrik adalah kendaraan masa depan terlebih mengingat kendaraan berbahan bakar fosil bergantung pada ketersediaan bahan bakar yang tidak dapat didaur ulang dan terbatas jumlahnya. “Memang perubahan apapun pasti akan ada resistensi, itu soal yang biasa. Tapi suatu saat pasti akan lebih tertata. Mau tidak mau maka kita harus mempersiapkan diri untuk menggunakan kendaraan listrik,” ujar Dirjen Hendro.

Sementara itu, Direktur Sarana Transportasi Jalan, Danto Restyawan menyatakan bahwa melalui kegiatan *touring* Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Jakarta – Bali menjadi

bukti bahwa kendaraan listrik dapat digunakan untuk perjalanan jauh.

“Hal tersebut membuktikan bahwa kendaraan listrik juga andal, nyaman, aman dan hemat. Masih banyak tantangan yang kita hadapi dalam perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, baik dari sisi produksi kendaraan listrik, komponen, penyebaran SPKLU dan juga perubahan mindset masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik,” kata Danto.

Danto menambahkan bahwa kampanye penggunaan kendaraan ramah lingkungan yang dilakukan melalui kegiatan *touring* kendaraan listrik ini merupakan momen



Serba-serbi Pameran kendaraan listrik bertema “Future SMEs Village”, yang berlangsung di Bali Art Collection, Nusa Dua Bali. Pameran yang digelar pada 12-16 November 2022 tersebut merupakan puncak dari kegiatan *touring* kendaraan listrik Jakarta-Bali sebagai *side event* KTT G20. Foto: HMS DJPD/TOL - MAD



Peresmian Pembukaan Pameran Kendaraan Listrik “Future SMEs Village” oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di Bali Collection, Nusa Dua, Bali, 11/11/2022. Foto: HMS DJPD/TOL

yang tepat sebagai salah satu kegiatan menjelang KTT G20 yang puncaknya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 November di Bali.

Pameran Kendaraan Listrik Tidak hanya melalui *touring* KBLBB, Danto menjelaskan bahwa Ditjen Hubdat juga turut memeriahkan penyelenggaraan KTT G20 dengan dukungan *shuttle* bus listrik dan juga pameran kendaraan listrik. Pameran kendaraan listrik ini diadakan di Art Bali, Bali Collection Nusa Dua mulai tanggal 12 hingga 16 November 2022.

Pameran kendaraan listrik ini diramaikan oleh 28 *exhibitor* dengan jenis kendaraan sepeda motor listrik, mobil listrik, bus listrik, truk listrik, kendaraan konversi, dan komponen pendukung KBLBB.

Selama pameran berlangsung, setiap harinya Ditjen Hubdat juga menggelar seminar dan *talkshow* yang berbeda setiap harinya dengan topik bahasan antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah Menanggapi Perkembangan Kendaraan Listrik;
2. Kendaraan Listrik Transportasi Masa Depan;
3. Implementasi Regulasi Kendaraan Listrik Terhadap Industri Lokal di Indonesia;
4. Persiapan Persaingan Kendaraan Listrik Anak Bangsa;
5. Kendaraan Listrik Tingkatkan Pembangunan Negara.*

Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat SINERGIKAN PUSAT DAN DAERAH



Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat 2022 di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah (22/11/2022). Foto: HMS DJPD/WBW

Guna memperkuat sinergi antar instansi pemerintah baik di sektor transportasi darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggelar kegiatan Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat Tahun 2022 di *Convention Hall* Terminal Tipe A Tirtonadi Kota Surakarta pada Selasa (22/11).

Dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiarno menyatakan bahwa dirinya mengajak seluruh pemerintah baik di tingkat pusat maupun

daerah untuk menyamakan visi dalam pelaksanaan tugas khususnya pada sektor Perhubungan Darat. Adapun 3 pembahasan utama yang menjadi pokok diskusi dalam kegiatan ini yakni seputar Keselamatan Transportasi Darat, Penanganan ODOL, serta Pengarahan Renops Angkutan Nataru 2022/2023.

“Semoga melalui rapat ini kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dalam rapat kerja ini saya ikutkan seluruh rekan yang

mengemban fungsi di Perhubungan mulai dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Kepala Dinas Provinsi, Kota, dan Kabupaten agar ada visi yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam penanganan bidang transportasi dan lalu lintas. Ketika ada visi dan langkah yang sama diharapkan ke depan tanggung jawab kita dalam menciptakan keselamatan transportasi ini dapat berjalan dengan baik,” demikian disampaikan Dirjen Hendro.

Seluruh jajaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyamakan visi misi dalam pelaksanaan tugas khususnya pada sektor Perhubungan Darat.

Menurut Dirjen Hendro, satu latar belakang diadakannya rapat ini karena akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan transportasi darat yang fatalitas korbananya luar biasa. “Semuanya ketika kecelakaan transportasi terjadi maka pertanggungjawabannya ada di Ditjen Hubdat. Maka pertanggungjawabannya ini saya bagi pada Dishub Kota dan Kabupaten. Anda inilah yang menciptakan keselamatan transportasi darat karena uji kendaraan ada di Pemda. Ketika anda tidak melakukan uji dengan baik maka ketika kecelakaan, rekan-rekan akan mempertanggungjawabkannya,” ujarnya. Menurutnya di masa kini semakin bertambah tantangan dalam mengemban tugas, salah



Dirjen Perhubungan Darat bersama jajaran Pejabat Eselon 2 Ditjen Perhubungan Darat pada Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah (22/11/2022). Foto: WBW

satunya dari segi perkembangan teknologi dan infrastruktur yang harus diantisipasi dengan baik.

“Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 60-70% tumbuh di perkotaan sehingga kondisi ini akan menambah mobilitas di perkotaan. Jangan sampai kita membangun transportasi tapi hanya sampai (batas) administratif kota atau kabupaten tapi perlu ada kolaborasi antar kota di sekitarnya,” imbau Dirjen Hendro.

Sementara itu, menanggapi persiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), Dirjen Hendro meminta seluruh personil yang berada di daerah untuk lebih meningkatkan koordinasi agar Nataru dapat berjalan dengan baik. “Pada Nataru tahun ini sudah ada kebebasan dan tidak ada larangan untuk mudik jadi pasti ada peningkatan arus lalu lintas. Jadi saya minta pada Kepala BPTD, Kadishub Provinsi maupun Kota dan Kabupaten untuk melakukan rampcheck terhadap bus pariwisata,” tambahnya.

Kegiatan Raker ini dilaksanakan secara *hybrid* dengan diikuti oleh sebanyak + 250 orang peserta yang hadir secara fisik dan sebanyak +350 orang yang hadir secara daring melalui Zoom Meeting. Peserta Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat Tahun 2022 terdiri

dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kepala BPTD di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta Asosiasi bidang Perhubungan Darat.

Pembahasan Kegiatan Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat Tahun 2022 dibagi dalam 2 panel/sesi, yaitu:

1. Mengangkat isu Keselamatan Transportasi Darat, Penanganan *Over Dimension Over Loading* (ODOL), serta Pengarahan Renops Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023;
2. Mengangkat isu Tata Kelola Perhubungan di Pemerintah Daerah sesuai amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Narasumber dalam Kegiatan ini berasal dari sejumlah instansi seperti Korlantas POLRI, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Akademisi/Pengamat Transportasi, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (*)

PENYERAHAN PENGHARGAAN



Dalam kegiatan Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat Tahun 2022 juga diberikan sejumlah penghargaan bagi unit kerja dan instansi terkait.

Adapun penghargaan yang diberikan sebanyak 5 kategori dengan rincian:

- 1. Unit kerja terbaik dalam kepatuhan aplikasi e-performance dan aplikasi e-sakip reviu tahun 2022:**
Terbaik 1: BPTD IX Prov. Jawa Barat; Terbaik 2: BPTD VI Prov. Bengkulu dan Lampung; Terbaik 3: BPTD XXV Prov. Papua dan Papua Barat
- 2. Satuan kerja pelaksana proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan kinerja terbaik tahun anggaran 2022:**
- BPTD XVIII Sulawesi Tenggara
- 3. Penghargaan atas kinerja terbaik dalam kategori peer collaboration (penggunaan, pemanfaatan dan sertifikasi) Barang Milik Negara (BMN)**
Terbaik 1: BPTD X Prov. Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; Terbaik 2: BPTD XIII Prov. Nusa Tenggara Timur; Terbaik 3 : Direktorat Lalu Lintas Jalan
- 4. Penghargaan atas kinerja terbaik dalam pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) kepada pemerintah daerah**
Terbaik 1: BPTD XVIII Sulawesi Tenggara; Terbaik 2: BPTD XXIV Maluku Utara; Terbaik 3: Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
- 5. Penghargaan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)**
- Dinas Perhubungan Kab. Bandung
- BPTD Wil IV Prov. Riau dan Prov. Kepulauan Riau.

MENEKAN FATALITAS TABRAK BELAKANG TRUK

Oleh: Djoko Setijowarno



Sebelum menempuh perjalanan jauh, sebaiknya beristirahat dengan cukup. Kalau di tengah perjalanan merasa lelah, langsung mencari tempat istirahat terdekat dan beristirahat untuk menghindari risiko kecelakaan.



Kondisi mini bus dan truk yang terlibat kecelakaan maut di Tol Ungaran Bawen pada Sabtu (24/9/2022). (Sumber: tribun jateng)

Kembali terulang kecelakaan akibat sopir diduga mengantuk menabrak belakang truk tidak berperisai di Jalan Tol Trans-Jawa di Jawa Tengah pada Sabtu (24/9/2022). Kecelakaan itu mengakibatkan lima orang tewas seketika.

Kebanyakan para pengemudi kendaraan pribadi merasa kurang nyaman atau takut jika lelah atau mengantuk melapor ke majikannya. Seharusnya juga para majikan sudah merasa si pengemudi mengantuk atau lelah dengan melihat pola mengemudi saat berkendara.

Di jalan tol, jika pengemudinya mengantuk, truk adalah kendaraan yang berisiko besar ditabrak dari

belakang. Apabila kendaraan truk tersebut dilengkapi perisai atau *Rear Underrun Protection* (RUP), maka jika ditabrak dari belakang tingkat fatalitasnya bisa turun dengan drastis. Tidak perlu sampai ada korban meninggal dunia atau luka berat.

Jika pemilik atau pengusaha truk memahami risiko ini, maka sebaiknya semua truk besar dipasang perisai atau RUP (*bumper* belakang) sesuai dengan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor. PM dibuat bertujuan untuk menurunkan tingkat fatalitas korban yang menabrak.

Pasal 3 (2), menyebutkan selain perlengkapan keselamatan, seperti sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; kendaraan bermotor selain sepeda motor harus dilengkapi (a) perisai kolong belakang, dan (b) perisai kolong samping.

Sopir Mengantuk

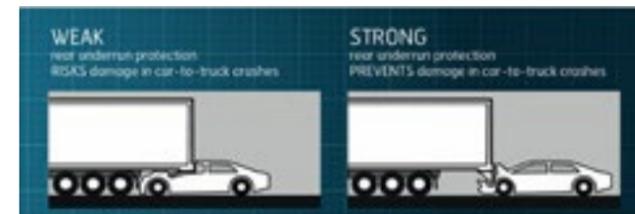
Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah pengemudi yang mengantuk. Sedangkan faktor penyebab fatalitas adalah tidak tersedianya perisai atau RUP pada kendaraan truk

Kendaraan barang di Indonesia memiliki karakteristik operasional yang spesifik, *final gear*-nya sudah distel kuat menggendong tetapi tidak kuat berjalan kencang. Sementara kondisi jalan primer kita banyak yang sub standar, kecepatan yang berbeda berada pada satu jalur, sehingga risiko tabrak depan depan dan tabrak belakang sangat tinggi. Demikian juga di jalan tol, *gap* kecepatannya sangat tinggi jauh di atas ambang batas yang bisa diterima berdasarkan standar IRAP (*International Road Assessment Programme*), sehingga risiko tabrak belakang di jalan tol juga sangat tinggi

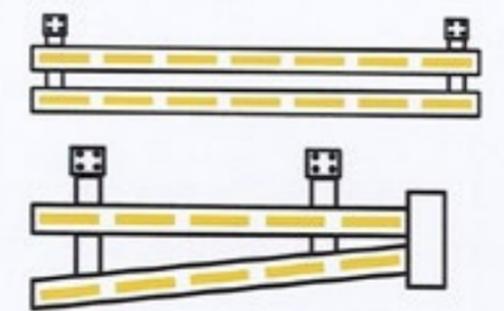
Oleh sebab itu, tindakan keselamatan yang paling logis, mudah dan praktis adalah (1) memperbaiki gap kecepatan dan menyediakan lajur lambat dan cepat di jalan arteri adalah hal sulit dan mahal; dan (2) ketika kita sulit menghilangkan risiko terjadinya suatu kecelakaan, maka tindakan paling logis adalah menurunkan risiko fatalitas saat kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan, yaitu dengan memasang *Rear Underrun Protection* (RUP) atau bahasa lapangannya bumper belakang pada truk. KNKT telah mengidentifikasi semua fatalitas kendaraan yang



Perisai Kolong Belakang (*Rear Underrun Protection*)



Pemasangan Perisai Kolong Belakang (*Rear Underrun Protection*) dapat menekan tingkat fatalitas dari kejadian tabrak belakang.



Perisai Kolong Samping (*Side Underrun Protection*)

menabrak truk dari belakang disebabkan karena masuk ke dalam kolong truk. Hal itu menyebabkan semua sistem keselamatan pasif tidak bekerja.

Untuk itu, perlu dicegah saat kecelakaan tabrak depan belakang terjadi kendaraan yang menabrak masuk ke dalam kolong, sehingga sistem proteksi keselamatan pasif yang berupa *crash protection box*, *airbag* serta sabuk keselamatan akan dapat bekerja menyelamatkan penumpang didalamnya.

Cara mencegahnya adalah dengan memasang *bumper* belakang pada semua truk tanpa kecuali. Pasalnya, truk adalah kendaraan yang berjalan lebih lambat dari kendaraan lainnya dan sering jadi sasaran empuk kendaraan yang lebih cepat dan pengemudinya lengah atau mengantuk.

Kecelakaan boleh saja terjadi, akan tetapi jangan sampai penumpangnya luka berat apalagi meninggal dunia. Cukuplah diberi *tensoplast* saja atau minum kopi untuk menghilangkan ketegangan. Mobil yang rusak bisa dibetulkan lain waktu. (*)

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat

PERISAI KOLONG BELAKANG DAN PERISAI KOLONG SAMPING

Perisai kolong belakang harus dipasang pada kendaraan bermotor jenis mobil barang dengan JBB mulai 5.000 kilogram, kereta gandengan, atau kereta tempelan. Pemasangan perisai kolong belakang dilakukan oleh pembuat, perakitan, pengimpor, dan/atau perusahaan karoseri.

Perisai kolong belakang dipasang dengan ketentuan (a) menggunakan bahan besi dan sejenisnya, (b) berbentuk pipa atau persegi yang menutup penuh sisi belakang kendaraan atau paling sedikit 80 persen dari lebar total kendaraan yang pemasangannya paling sedikit sejajar atau tidak melebihi 100 mm dari ujung terluar bagian belakang dinding bak muatan kendaraan, (c) dipasang dengan ketinggian bagian sisi bawah dari perisai kolong belakang ke permukaan jalan tidak lebih dari 550 mm, (d) dipasang dengan ketinggian sudut pergi paling kecil 8 derajat, dan (e) terpasang kokoh pada chassis atau subframe pada kendaraan bermotor dengan sambungan mur baut (bolt nut).

Perisai kolong samping dipasang dengan persyaratan (a) tinggi bagian samping badannya berjarak lebih dari 700 mm yang terukur dari permukaan jalan dan/atau sumbu paling belakang berjarak lebih dari 1.000 mm diukur dari sisi terluar bagian belakang, (b) dipasang dengan ketinggian bagian sisi bawah dari perisai kolong ke permukaan jalan tidak lebih dari 550 mm, dan (c) menggunakan bahan logam berbentuk persegi panjang atau pipa.

Perisai kolong samping dapat dipasang bahan logam atau bukan logam berbentuk plat untuk mengurangi hambatan angin guna efisien bahan bakar. Pemasangan perisai kolong samping pada mobil barang, paling besar tidak boleh melebihi atau sejajar bagian terluar dari dinding samping mobil barang. Penyediaan dan pemasangan perisai kolong samping harus dilakukan oleh perusahaan karoseri kendaraan bermotor. (*)



Dari kiri ke kanan: Menteri ESDM Arifin Tasrif, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Santyabudi pada acara Electric Vehicle Funday, Jakarta (20/11/2022). Foto: WBW

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan sejumlah keuntungan menggunakan kendaraan listrik. Hal ini diungkapkan Menhub saat menghadiri kegiatan “*Electric Vehicle - Funday*” yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (20/11), sebagai bagian dari upaya menyosialisasikan penggunaan kendaraan listrik secara massal di Indonesia.

“Saat ini sudah banyak kendaraan listrik yang bentuknya keren, energi bersih ramah lingkungan, dan lebih irit dari kendaraan berbahan bakar fosil (BBM). Secara keseharian, bisa lebih irit 75 persen dalam sehari dibandingkan dengan motor BBM. Kalau biasanya mengeluarkan uang Rp. 100 ribu sehari, ini Rp. 25 ribu saja sudah cukup,” ujar Menhub.

Berdasarkan hitungan yang dilakukan Ditjen Perhubungan Darat, satu liter BBM setara dengan 1,2 Kwh listrik. Dengan harga listrik per kWh Rp 1.444 atau dibulatkan Rp 1.500, berarti 1,2 kWh listrik harganya

ELECTRIC VEHICLE FUNDAY, SOSIALISASIKAN KENDARAAN LISTRIK



sekitar Rp 1.700. Artinya penggunaan kendaraan listrik jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan satu liter BBM yang saat ini seharga Rp 10.000-21.000. Pada mobil listrik, setiap 1 kilowatt hour (kWh) bisa menjalankan mobil listrik sejauh 5-7 kilometer, sementara dengan kapasitas penuh mobil listrik rata-rata sebesar 45 kWh, kendaraan listrik bisa melaju hingga 300 kilometer.

Selain lebih hemat energi dan biaya, keuntungan lainnya yang didapat dari penggunaan kendaraan listrik yaitu: lebih terjamin, karena pemerintah akan terus mendorong semakin banyaknya fasilitas pengisian daya. Kemudian banyak insentif, dimana saat ini terus dibahas antar Kementerian/Lembaga, untuk memberikan insentif seperti: keringanan pajak, bebas ganjil



Selain lebih hemat energi dan biaya, keuntungan lainnya yang didapat dari penggunaan kendaraan listrik yaitu: lebih terjamin, karena pemerintah akan terus mendorong semakin banyaknya fasilitas pengisian daya.

genap, diskon daya listrik rumahan, bebas parkir, dan sejumlah benefit lainnya. Serta, lebih ramah lingkungan sehingga lebih bebas dari polusi udara, dan kita tidak tergantung pada bahan bakar fosil yang sudah mulai langka.

Lebih lanjut, Menhub menuturkan, pemerintah telah menyiapkan strategi untuk terus meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Adapun strategi yang disiapkan yaitu: tahap pertama menyasar penggunaan kendaraan listrik di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Kedua, penggunaan kendaraan listrik pada transportasi massal yakni: bus, taksi, dan sepeda motor (ojek *online*). Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak fasilitas pengisian daya (*charging station* dan tempat penukaran baterai).

Terkait adanya instruksi penggunaan kendaraan dinas untuk pemerintah pusat dan daerah, Menhub membeberkan kiatnya dalam mengimplementasikan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional di Kemenhub di tengah keterbatasan anggaran yang ada “Adanya Inpres mewajibkan bagi K/L untuk melaksanakannya. Yang kami lakukan adalah *leasing* (menyewa) kendaraan listrik, jadi tidak perlu membeli. Insya Allah ini bisa menjadi kunci bagi K/L lain,” ujar Menhub.

Kemudian selanjutnya, terkait dengan penyediaan fasilitas pengisian

daya seperti *charging station* atau tempat penukaran baterai, Menhub mengusulkan kepada K/L terkait untuk melakukan standarisasi pembuatan baterai, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan penggantian baterai kendaraannya dimanapun. “Standarisasi baterainya jangan sendiri-sendiri. Mereknya bisa berbeda-beda, tetapi bentuk, ukuran, dan sistemnya sama,” kata Menhub.

Menhub mengatakan, pemerintah telah berkomitmen untuk serius mengembangkan kendaraan listrik sebagai kendaraan masa depan, melalui regulasi dan kebijakan. Diantaranya yaitu melalui terbitnya Perpres tentang percepatan implementasi kendaraan listrik yang menjadi payung hukum dalam mewujudkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, dan



Menindaklanjuti hal itu, Kemenhub telah mengeluarkan sejumlah regulasi dan kebijakan untuk mempercepat implementasi penggunaan kendaraan listrik secara massal di Indonesia. Diantaranya yaitu regulasi terkait uji tipe kendaraan listrik, penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional pemerintah, dan yang terkini yaitu regulasi tentang konversi kendaraan sepeda motor dan kendaraan lainnya dari BBM menjadi listrik berbasis baterai. Selain regulasi, Kemenhub berkolaborasi dengan pemangku kepentingan juga menyelenggarakan pameran, touring kendaraan listrik, dan kegiatan sosialisasi lainnya.

Kegiatan Sosialisasi *Electric Vehicle “Funday”* yang diselenggarakan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat diisi dengan berbagai kegiatan yakni: konvoi motor listrik, edukasi interaktif & sosialisasi motor listrik, demo bengkel konversi, *café style mini talkshow*, dan pertunjukan musisi jalanan.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pihak yakni: Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Santyabudi, dan kalangan selebritis Andre Taulany. Menhub bersama sejumlah undangan melakukan konvoi motor listrik diawali dari Kantor Balai kota menuju Bundaran HI (sebelah Hotel Mandarin Oriental) via lewat Menteng. Konvoi ini menghadirkan sekitar 90 lebih motor dari berbagai merk seperti Gesit, Segway, Selis, Electrum, United, Smoth dan Oyika, serta dari beberapa komunitas motor listrik seperti Kosmik, Elders dan Vespa.*)

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh menghadiri kegiatan Persiapan Pelaksanaan Badan Layanan Umum (BLU) pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi pada (07/10) pagi. Kegiatan ini merupakan sebuah penanda bahwa BPLJSKB kini tetap ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum atau BLU.

Amirulloh menambahkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pengujian kendaraan bermotor, BPLJSKB membutuhkan inovasi, pembaruan dan peningkatan jasa dan layanan kepada masyarakat serta fleksibilitas berupa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum (BLU).

“Melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 392/KMK.05/2022 tanggal 23 September 2022 lalu, Kementerian Keuangan telah menetapkan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU),” kata Amirulloh.

Amirulloh melanjutkan, “Dengan status BLU yang telah diberikan tersebut, saya mengharapkan BPLJSKB memiliki mindset baru sebagai satker BLU yang berbeda dari satker yang lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. BLU BPLJSKB harus dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin dengan efisiensi biaya, waktu dan proses bisnis meskipun tidak mengutamakan profit serta dapat bersaing dengan sektor bisnis.”

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi merupakan



Sesditjen Perhubungan Darat, Amirulloh memberikan pengarahan pada kegiatan persiapan pelaksanaan BPLJSKB menjadi BLU, 7/10/2022. Foto: HMS DJPD/BYU

BPLJSKB KINI JADI BADAN LAYANAN UMUM

Dengan status BLU yang telah diberikan tersebut, diharapkan BPLJSKB memiliki *mindset* baru sebagai satker BLU yang berbeda dari satker yang lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan kendaraan khusus.

“Terdapat 7 pelayanan yang saat ini dilaksanakan oleh BPLJSKB, yaitu: Pengujian Fisik Kendaraan Bermotor,

Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Uji Sampel Kendaraan Bermotor, Pengujian Kendaraan Bermotor Konversi, Pengujian Modifikasi, Pengujian Emisi CO2 dan/atau konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor, dan Pengujian terhadap pengembangan prototype teknologi kendaraan bermotor,” jabarnya.

Di samping itu, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga sedang mengusahakan untuk penambahan fasilitas pengujian kendaraan berstandar internasional pada BPLJSKB melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) *Proving Ground* yang direncanakan akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2025.

Dengan penambahan fasilitas pengujian tersebut, diharapkan akan meningkatkan pelayanan pengujian pada BPLJSKB, dimana saat ini BPLJSKB menghadapi tantangan dan juga peluang berupa:

1. Perkembangan regulasi dan teknologi pada kendaraan bermotor yang mengacu pada standar internasional;
2. Tingginya kebutuhan pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor dari pembuat/perakit atau pengimpor kendaraan bermotor di wilayah Indonesia maupun regional ASEAN;
3. Terbatasnya fasilitas uji tipe kendaraan bermotor di wilayah regional ASEAN.

“Posisi sampai dengan Bulan Oktober 2022, realisasi Pendapatan PNBP yang telah diterima oleh BPLJSKB adalah sebesar Rp15,158 Miliar dari Target Pendapatan PNBP 2022 sebesar Rp15 Miliar atau 101,06%. Hal ini tentunya merupakan prestasi yang membanggakan karena BPLJSKB dapat memenuhi target tahunan Pendapatan PNBP Tahun 2022. Kemudian seiring dengan peningkatan pelayanan dan jumlah pelayanan pengujian, pada tahun 2023 diproyeksikan BPLJSKB akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp20,7 Miliar,” lanjut Amirulloh.

Sementara itu, Kepala BPLJSKB, Yusuf Nugroho menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan dan segenap tim yang memberikan dukungan dari awal

pengajuan hingga terbitnya SK Menteri Keuangan tersebut.

“Target PNBP di BPLJSKB Tahun 2022 sebesar 15 Miliar, saat ini total penerimaan mencapai Rp 15.678.866.328 2. PNBP BPLJSKB pada tahun 2022 pertanggal 23 September 2022 sebesar Rp 14.786.426.328 3. PNBP BPLJSKB terhitung dari 24 September 2022 s/d 6 Oktober 2022 sebanyak 50 transaksi sebesar Rp 892.440.000,” demikian disampaikan dengan rinci oleh Yusuf.

Amirulloh berharap tercipta *mindset* yang harus dimiliki oleh para pengelola BLU BPLJSKB sehingga BLU dapat terus adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnisnya. Saya mengharapkan, kedepan BLU BPLJSKB akan dapat bertransformasi menjadi unit kerja yang lebih *agile* dan adaptif dalam perubahan kebutuhan jasa layanan pengujian, mendorong perkembangan inovasi jasa layanan pengujian tipe kendaraan bermotor, meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan, meningkatkan profesionalitas dan integritas pelayanan, lebih

optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset, baik oleh sendiri maupun kerja sama dengan mitra, serta mampu mengenali tantangan dan risiko pada masa mendatang,” pungkasnya.

Menhub Kunjungi BPLJSKB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sabtu (12/11) meninjau Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat, yang direncanakan akan segera mulai dibangun menjadi balai pengujian yang berstandar internasional.

“Hari ini saya datang ke sini, untuk memastikan kesiapan akan dimulainya proyek pembangunan *proving ground* atau *Vehicle Testing Certification Center* (VTCC). Insya Allah kita mulai pembangunan usai KTT G20 dan semoga bapak Presiden berkenan untuk melakukan *groundbreaking*,” ujar Menhub.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, “Jika ini selesai dibangun, kita akan melompat ke euro 6, sehingga kendaraan yang diuji di sini tidak perlu lagi melakukan pengujian di luar negeri,” tutur Menhub.(*)



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau persiapan proyek pembangunan *proving ground* atau *Vehicle Testing Certification Center* (VTCC) di BPLJSKB (12/11/2022). Foto: BKIP

DUKUNGAN BAGI PROYEK PROVING GROUND TERBESAR DI ASIA TENGGARA

Pengembangan kawasan *Proving Ground* Bekasi melalui skema KPBU yang diusung Kementerian Perhubungan RI, dapat menghasilkan pengujian tipe kendaraan bermotor yang lebih akurat dan memenuhi standar internasional.

Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) nya, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penjaminan proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat. Dimulainya proyek infrastruktur tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian

Kerja Sama, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres oleh Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/ PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dan PT *Indonesia International Automotive Proving Ground* (IIAPG) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) di Jakarta pada Senin (31/10).

Adapun Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian KSPI ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI selaku PJPK dan IIAPG selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP), dan Perjanjian Penjaminan ditandatangani oleh PT PII selaku BUPI dan PT IIAPG selaku BUP, serta Perjanjian Regres antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI selaku PJPK dan PT PII selaku BUPI.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Kemenkeu selalu siap memberikan dukungan dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, untuk bekerja sama menggunakan berbagai macam fasilitas pembiayaan inovatif, yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari kementerian dan lembaga.

“Saya tentu berharap bahwa dengan dilaksanakan proyek ini, tentu tidak hanya sekedar biayanya tapi manfaatnya bagi perekonomian nasional, dan tentu juga bagi perekonomian di Bekasi sendiri yang menjadi lokasi akan bisa meningkatkan aktivitas, yaitu tadi mendukung industri otomotif Indonesia sehingga mampu menembus pasar internasional, dan memberikan jaminan keselamatan



Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menerima plakat dari Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pejabat terkait lainnya pada saat Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, Perjanjian Regres dan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi di Jakarta, 31/10/2022. Foto: HMS DJPD/MAD

di dalam negeri dengan standar-standar otomotif yang memang sudah dibakukan baik pada level regional ASEAN maupun internasional. Saya senang karena di dalam proyek ini tidak sekedar membangun proyek namun juga membangun sebuah sistem termasuk dari sisi perawatannya, sehingga dia akan menjadi salah satu ikon dari *center of excellent* yang saya harap akan mampu mendukung industri otomotif makin kompetitif dan dikenal di seluruh dunia,” ujar Menkeu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pengembangan kawasan *Proving Ground* Bekasi melalui skema KPBU yang diusung Kementerian Perhubungan RI, dapat menghasilkan pengujian tipe kendaraan bermotor yang lebih akurat dan memenuhi standar internasional, sehingga akan meningkatkan aspek keselamatan kendaraan bermotor.

Selain itu juga mendukung komitmen Indonesia untuk mengendalikan tingkat emisi karbon pada

kendaraan, serta mengurangi ketergantungan pendanaan dari APBN.

“Dengan hadirnya *Proving Ground* sebagai fasilitas pengujian kendaraan terbesar se-Asia Tenggara ini akan meningkatkan daya saing, karena uji coba produk otomotif bisa dilakukan di dalam negeri dan langsung bisa diekspor tanpa harus dilakukan uji coba kembali di luar negeri. Insha Allah kita akan lakukan *groundbreaking* pembangunannya pada tahun ini,” ujar Menhub.

Sementara itu, Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo menyatakan bahwa melalui proyek *Proving Ground* Bekasi ini, PT PII mendukung penuh Kemenkeu & Kemenhub dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya dalam dukungan pada ekosistem kendaraan listrik atau *Electric Vehicle* (EV) di Indonesia, serta penurunan emisi kendaraan bermotor dengan mandat yang dipercayakan kepada pihaknya yaitu pelaksana Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi & Penjaminan pada proyek tersebut.

“Kami berharap dengan dukungan yang kami berikan dapat mempercepat pembangunan proyek *Proving Ground* Bekasi ini juga dapat membantu Pemerintah pada Proyek Strategis Nasional lainnya yang membutuhkan PDF dan Penjaminan dengan skema KPBU sehingga dapat mendukung dapat meringankan APBN yang saat ini tengah fokus dialokasikan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional,” tutup Sutopo.

Proving Ground merupakan fasilitas pengujian di luar ruangan (*outdoor test*) sesuai dengan standar internasional yang telah mengadopsi *United Nations Agreement Concerning The Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval For Motor Vehicle Equipment and Parts* (UN Agreement).

Akan ada sekitar 16 fasilitas pengujian sesuai dengan standar internasional *United Nation Regulation* (UNR) yang rencananya akan diterapkan di negara ASEAN yang tergabung dalam *ASEAN Mutual Recognition Agreement*.(*)



Terminal Tipe A Mangkang Semarang. Revitalisasi Terminal Tipe A yang digagas Kementerian Perhubungan mengusung potensi sosial ekonomi yang melibatkan pelaku UMKM untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada di Terminal. Foto: terminalonline.id

TERMINAL WAJIB BERI RUANG BAGI UMKM

Terminal harus menyediakan fasilitas tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit tiga puluh persen. Pemeliharaan terminal penumpang wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 24 tahun 2021 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan disebutkan bahwa terminal harus menyediakan fasilitas tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit

tiga puluh persen. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas, Setditjen Perhubungan Darat, Endy Irawan, ketika membacakan pidato sambutan Dirjen Perhubungan Darat pada saat pembukaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bidang

Perhubungan Darat mengenai Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Yogyakarta, Selasa, 25/10/2022.

Endy melanjutkan, “Pemeliharaan terminal penumpang wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.” Selain itu penyelenggaraan terminal penumpang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan swasta. Dalam hal apa saja penyelenggaraan terminal penumpang dapat dikerjasamakan? “Penyelenggaraan terminal penumpang yang dapat dikerjasamakan yaitu pembangunan, pengembangan, penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang, pemeliharaan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pembiayaan,” jelas Endy.

Terkait dengan penyelenggaraan bidang angkutan jalan, saat ini dalam Permenhub Nomor PM 25 tentang penyelenggaraan bidang angkutan jalan sesuai



Kunjungan peserta Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Perhubungan Darat ke Terminal Tipe A Dhaksinarga Gunung Kidul, Yogyakarta, 25/10/2022. Foto: HMS DJPD/CAS



amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terdapat substansi baru. Endy menguraikan, “Substansi baru tersebut yaitu pemberian subsidi oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang diberikan kepada: angkutan barang umum; dan/atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan jalan.”

Sebelumnya, Endy menjelaskan bahwa tujuan dari disusnya UU Nomor 11 tahun 2020 adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kehidupan yang layak melalui: Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian; Peningkatan ekosistem investasi; Kemudahan berusaha; Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

“Sebagai tindak lanjut UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja maka Kementerian Perhubungan

khususnya Ditjen Perhubungan Darat turut serta mendukung peningkatan iklim investasi di sektor transportasi darat melalui penetapan PP Nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan,” jelas Endy.

“Tujuan dari PP Nomor 30 tahun 2021 tersebut,” Endy melanjutkan, “Antara lain: Kemudahan berusaha; Penyederhanaan perizinan berusaha; Membuka peluang investasi bagi pihak ketiga (pihak swasta) dalam penyelenggaraan transportasi darat; dan Membuka lapangan pekerjaan baru dengan adanya peluang investasi bagi pihak ketiga.”

Menurutnya, dalam PP Nomor 30 tahun 2021 tersebut terdapat 16 (enam belas) amanat untuk diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri perhubungan, yaitu terkait dengan analisis dampak lalu lintas, pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, terminal penumpang, angkutan jalan, dan penimbangan kendaraan bermotor.

Narasumber yang menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut antara lain: Yovial Adiwijaya dari Biro Hukum Kemenhub dengan materi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan peraturan pelaksanaannya di bidang LLAJ; Ahmadi ZB dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan materi mengenai Permenhub Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan; dan Rizky Perdana Putra dari Direktorat Angkutan Jalan dengan materi mengenai Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang LLAJ. Bertindak selaku moderator pada kegiatan tersebut adalah Joko Umboro dari BPTD Wilayah X Jateng-DIY.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut dihadiri secara daring maupun luring oleh sejumlah perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Balai Pengelola Transportasi Darat, Satuan Pelayanan Terminal dan sejumlah perwakilan instansi pusat.(*)



Sejumlah kendaraan disiapkan pada uji coba angkutan Antar Lintas Batas Negara (ALBN) yang akan dioperasikan oleh Perum DAMRI dengan rute Kupang - Dili. Foto: HMS DJPD/HS

Kementerian Perhubungan pada 19 Juli 2022 yang lalu telah menandatangani *MoU on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches Between Indonesia and Timor Leste*, MoU tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan RI dan Menteri Transportasi dan Komunikasi Timor Leste. Saat ini untuk mempersiapkan kehadiran layanan angkutan rute Kupang-Dili tengah dilakukan penyusunan *standard operating procedures (SOP)* yang akan dijadikan pedoman dalam implementasi MoU tersebut antara kedua belah pihak.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh hadir dalam acara pembahasan SOP dan persiapan uji coba operasional bus Antar Lintas Batas Negara yang akan dioperasikan oleh DAMRI dengan rute Kupang-Dili di Hotel Sotis Kupang pada Senin (10/10) dengan pihak Timor Leste.

"Hari ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Indonesia dan Timor Leste sudah

KEMENHUB SIAPKAN ALBN KUPANG-DILI

RI-Timor Leste sepakat membuka lintas batas negara antara Kupang dan Dili sebagai representasi Indonesia dan Timor Leste. Kehadiran angkutan Antar Lintas Batas Negara (ALBN) yang menghubungkan wilayah Indonesia yakni Kupang, NTT dan Dili di wilayah Timor Leste merupakan bagian kerjasama kedua negara tersebut di bidang transportasi.

bersepakat bahwa akan membuka lintas batas negara antara Kupang dan Dili sebagai representasi Indonesia dan Timor Leste. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh MoU bapak Menteri Perhubungan pada Juli lalu. Hari ini kami membahas detail SOP nanti akan seperti apa dan telah disepakati oleh kedua belah pihak," jelas Amirulloh.

Kehadiran angkutan antar lintas batas negara (ALBN) dari wilayah Indonesia yakni Kupang, NTT

menuju Dili di wilayah Timor Leste merupakan bagian kerjasama RI - Timor Leste di bidang transportasi.

"Hari ini juga akan dilakukan uji coba bersama rekan-rekan dari Timor Leste dan kita akan melihat di titik mana yang akan menjadi tempat pemberhentian penumpang. Ini sangat penting karena jarak tempuhnya cukup jauh, lebih dari 9 jam, di mana menurut aturan kalau sudah

mengendarai lebih dari 4 jam, maka pengemudi harus beristirahat dan/atau operator harus menyediakan pengemudi cadangan. Nanti akan kita lihat titik titik mana yang dapat disediakan tempat istirahat," jelas Amirulloh.

Menurutnya kedekatan emosional dan nilai historis hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste juga dapat memperlancar kehadiran ALBN ini.

"Timor Leste menyatakan bahwa pada November 2022 akan datang armada bus tersebut ke Timor Leste dan kita berupaya sesegera mungkin angkutan lintas batas negara ini beroperasi. Harapannya dengan beroperasinya angkutan ini maka hubungan kedua negara semakin baik lagi dan masyarakat saya yakin masih ada ikatan emosional atau bahkan ikatan keluarga yang juga perlu didukung dengan kehadiran sarana transportasi," jabar Amirulloh.

Amirulloh menjelaskan bahwa ALBN yang akan beroperasi ini telah disepakati memiliki standar pelayanan minimum.



Atas: Rapat Tindak Lanjut Memorandum of Understanding on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches Between Indonesia and Timor Leste, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 10/10/2022. Foto: HMS DJPD/HS



Sesditjen Perhubungan Darat Amirulloh memberikan arahan usai uji coba rute bus Antar Lintas Batas Negara RI-Timor Leste, 10/10/2022. Foto: HMS DJPD/HS

"Mohon dukungan dari masyarakat di Kupang khususnya, NTT pada umumnya. Dengan tersedianya angkutan ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat membantu mobilitas masyarakat Indonesia yang akan ke Timor Leste," pungkasnya.

Turut hadir sebagai perwakilan dari Timor Leste yaitu Gaspar de Araujo selaku Direktur Jenderal Transportasi & Komunikasi Kementerian Transportasi & Komunikasi Timor-Leste.*





Direktur Angkutan Jalan Suharto bersama Head of the Swiss Economic Cooperation Office (SECO) in Jakarta Andrea Zbinden, Lead Climate Advisor Gerd Fleischer, dan perwakilan GIZ Indonesia Achmad Zacky Ambadar pada saat konferensi pers Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali, 20/10/2022. Foto: HMS DJPD/RP

Untuk mendorong kemajuan dan perkembangan transportasi berkelanjutan di perkotaan Indonesia, perlu dilakukan percepatan transisi menuju transportasi berkelanjutan. Sejumlah hal terkait transportasi berkelanjutan dibahas dalam Sustainable Transportation Forum atau STF 2022 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, GIZ SUTRI NAMA & INDOBUS, dan ITDP Indonesia yang telah turut andil membantu kemajuan dan perkembangan transportasi berkelanjutan di perkotaan Indonesia. Salah satu dari sekian banyak dukungan yang telah diberikan adalah melalui rangkaian acara Sustainable Transportation Forum 2022 yang diselenggarakan hari ini,” Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno yang mewakili

Dialog Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan dalam Sustainable Transportation Forum

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kesempatan yang baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, mitra pembangunan, dan stakeholder lain untuk dapat berkolaborasi mewujudkan transportasi berkelanjutan di kawasan perkotaan Indonesia.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi pada Kamis (20/10).

“Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa mobilitas perkotaan menghadapi banyak permasalahan, mulai dari jaringan

transportasi umum yang terbatas, peningkatan jumlah kendaraan pribadi secara masif, kemacetan, dan permasalahan lainnya. Berbagai permasalahan ini tentu menimbulkan banyak dampak buruk dan kerugian dari segi lingkungan

maupun ekonomi. Sementara itu, pengembangan transportasi umum perkotaan juga menemukan banyak tantangan, diantaranya: kurangnya kelembagaan yang efektif dan integrasi rencana transportasi perkotaan, serta kapasitas fiskal masing-masing daerah,” jabar Dirjen Hendro lebih lanjut.

Acara STF 2022 yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 20 hingga 21 Oktober 2022 ini bertujuan untuk menampung dan berbagi praktik terbaik dalam transportasi perkotaan yang berkelanjutan serta menyelaraskan manajemen dan kebijakan transportasi perkotaan yang terintegrasi oleh para aktor transportasi Indonesia maupun dunia.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kesempatan yang baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, mitra pembangunan, dan stakeholder lain untuk dapat berkolaborasi mewujudkan transportasi berkelanjutan di kawasan perkotaan Indonesia.



Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Suharto yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah pusat akan mendorong angkutan umum sebagai saran mobilisasi masyarakat melalui kebijakan yang diterbitkan.

“Kita semua mengakui bahwa dengan meningkatnya harga BBM dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Angkutan umum diharapkan menjadi solusi. Pembangunan infrastruktur transportasi saat ini masih sangat rendah, rata-rata di bawah 1%. Sedangkan pertumbuhan kendaraan pribadi di atas 8%. Tentunya tidak mungkin pertumbuhan prasarana akan sejajar dengan pertumbuhan sarana, maka yang terjadi adalah kemacetan,” jelas Suharto.

Saat ini menurut Suharto ada beberapa program pemerintah yang sejalan dengan program dari negara maju lainnya seperti usaha menekan polusi tinggi dengan penggunaan angkutan umum. “Ke depannya akan kita gunakan angkutan umum ramah lingkungan yaitu tidak hanya menggunakan angkutan umum berbahan bakar fosil tapi juga menggunakan kendaraan berbahan bakar baterai atau listrik,” kata Suharto.

STF 2022 dihadiri oleh berbagai kementerian, mitra pembangunan internasional dan lokal, lembaga pendanaan, masyarakat umum, akademisi, media, dan praktisi di bidang transportasi. Pakar ahli yang hadir telah dipilih berdasarkan pengalaman dan juga visi terhadap masa depan transportasi perkotaan berkelanjutan di Indonesia.

Melalui diskusi dan sharing dari kasus yang ditemui di lapangan, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat lebih sigap dan fleksibel jika dihadapkan pada permasalahan di luar cakupan teoritis.

Agenda diskusi yang akan dijalankan dalam gelaran STF 2022 sangat beragam, mulai dari Ak-selerasi Adopsi Kendaraan Listrik, Reformasi Transportasi Umum di Indonesia, Langkah Kolaborasi dalam Penyediaan Transportasi Umum, Persiapan BRT, Memahami Mobilitas Perkotaan, Infrastruktur Transportasi yang Inklusif, Isu Hunian dan Transportasi Perkotaan, Pengembangan Transportasi Tidak Bermotor, hingga Masa Depan Transportasi yang Berkelanjutan.

Turut hadir langsung dalam acara ini yakni Plt Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kementerian, Lukijanto, Head of the Swiss Economic Cooperation Office (SECO) in Jakarta Andrea Zbinden, dan Lead Climate Advisor Gerd Fleischer.*



Target Kementerian Perhubungan terkait Elektrifikasi Angkutan Umum Nasional

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan memiliki target untuk melakukan elektrifikasi 100% angkutan umum di Indonesia pada tahun 2040. Target implementasi bus listrik di luar TransJakarta dan menggunakan intervensi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk mengembangkan angkutan umum di luar DKI Jakarta sebagai berikut:

2021	2 Kota Pertama: 1 koridor di Bandung, 2 koridor di Surabaya
2022	6 Koridor: pada 6 kota percontohan berikutnya
2023	2 Kota: Elektrifikasi pembangunan BRT di Bandung dan Medan
2024	Perluasan Implementasi di 10 Kota Percontohan
2025	10 Provinsi: Implementasi tahap I di 10 ibu kota provinsi (selain DKI Jakarta)
2026	10 Provinsi: Implementasi tahap II di 10 ibu kota provinsi
2027	Pengembangan jaringan angkutan umum listrik
2028	Elektrifikasi angkutan umum yang sudah habis masa pakainya menjadi berbasis listrik
2029	Konversi dan Pengembangan jaringan yang sudah ada
2030	90% angkutan massal sudah berbasis listrik di 34 provinsi di Indonesia

SARANA

DIRJEN HUBDAT AJAK SEMUA PIHAK WUJUDKAN KESELAMATAN JALAN



Dalam paparannya yang berjudul Agenda Keselamatan Jalan Menuju Indonesia Emas 2045, yang disampaikan pada Seminar Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia di Yogyakarta, Kamis (3/11), Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan, "Dukungan dari berbagai pihak merupakan kunci terwujudnya keselamatan jalan, sehingga diharapkan adanya kolaborasi bersama untuk menurunkan angka kecelakaan di Indone-

sia." Dirinya mengingatkan bahwa keselamatan jalan adalah tanggung jawab bersama.

Dirjen Hendro melanjutkan, "Setiap angka pada data kecelakaan berkaitan dengan nyawa manusia, secara sosial amat jarang dibahas atau dianggap sebagai sesuatu yang biasa sebagai konsekuensi atau resiko berlalu lintas." Menurutnya apapun alasannya korban kecelakaan merupakan masalah kemanusiaan yang harus diperjuangkan untuk dapat diminimalisir sekecil mungkin. "Dalam program *road safety*, perjuangan mencapai *zero accident* memang boleh dikatakan tidak mungkin, namun di balik semua itu spirit menyelamatkan manusia sebagai aset utama bangsa dan spirit kemanusiaan inilah yang pertama dan utama," jelasnya. Korban kecelakaan akan mengalami sesuatu yang kontra produktif dari kehilangan waktu hingga kehilangan nyawa. Dirinya berpendapat, "Bukan hal mudah membangun *road safety* (lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar), karena memerlukan *political will* yang kuat, komitmen, sinergitas dan konsistensi dalam mencapainya.

Pertumbuhan ekonomi yang dicirikan dengan perkembangan infrastruktur termasuk penambahan panjang jalan, penambahan jumlah kendaraan bermotor, penambahan frekuensi mobilitas masyarakat, di sisi lain turut berkontribusi terhadap resiko terjadinya kecelakaan di jalan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan pada tahun 2030 akan ada 3,6 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. "Makin panjang jalan itu dibangun, makin tumbuh kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor, maka hal ini berkorelasi dengan meningkatnya angka kecelakaan," kata Dirjen Hendro.

Beberapa pembicara pada Seminar Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia antara lain: Danang Parikesit, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR; Muhammad Fauzan dari PT. Utama Karya; Profesor Agus Taufik Mulyono, Ketua Umum MTI; serta Sumbo Tinarbuko, budayawan penggiat resesik sampah visual. Kemudian Muslich Zainal Asikin, Ketua MTI Wilayah DIY menjadi moderator dalam seminar tersebut.*

PRASARANA

MENHUB TINJAU TERMINAL TIPE A LEUWI PANJANG BANDUNG



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sabtu (1/10), meninjau Terminal Tipe A Leuwi Panjang di Bandung, Jawa Barat, yang telah selesai dilakukan revitalisasi dan sudah beroperasi pada Januari 2022 lalu. Di terminal ini, Menhub juga memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dihadiri jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub yang ada di Jawa Barat.

Berbeda dengan kondisi sebelumnya, Terminal Leuwi Panjang kini memiliki tampilan yang lebih modern, lebih bersih, lebih nyaman, dan tidak kalah dari stasiun atau bandara. Ini merupakan

bagian dari komitmen membangun infrastruktur transportasi yang *delivered*, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Sekarang kita lihat kota Bandung punya terminal bus yang keren, busnya (yang datang ke terminal) banyak ada dari Sukabumi, Jakarta, Garut dan sebagainya. Konektivitas telah terjadi di terminal ini. Saya apresiasi rekan Ditjen Perhubungan Darat yang mengelola terminal ini dengan baik," ujar Menhub.

Terminal Leuwi Panjang berada di lahan seluas 26 ribu meter persegi dan berkonsep mixed use, dimana terminal tidak hanya sebagai simpul transportasi naik turun penumpang, tetapi juga menjadi pusat perekonomian dan kegiatan masyarakat. Terminal ini telah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti: counter check in, ruang tunggu keberangkatan, sky bridge, area komersial, area ramp check, kids zone, dan fasilitas pendukung lainnya.

Melalui revitalisasi dan modernisasi terminal ini, diharapkan semakin meningkatkan minat masyarakat mengguna-

kan angkutan umum massal bus. Saat ini, rata-rata jumlah penumpang bus di Terminal Leuwi Panjang mencapai sekitar 10 ribu lebih orang perharinya dan 426 bus (AKAP, AKDP, dan Trans Bandung/BTS) per harinya.

Lebih lanjut, dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Menhub mengingatkan kepada insan perhubungan untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam bekerja. "Kalau kita ingat Pancasila Insyaallah negara kita terus bersatu, jangan berpikir yang lain dari Pancasila," tutur Menhub.



Turut hadir pada kunjungan kerja di Terminal Tipe A Leuwipanjang Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno dan sejumlah pejabat UPT Kementerian Perhubungan di Jawa Barat.*

LALU LINTAS

JELANG NATARU, KEMENHUB INSTRUKSIKAN RAMP CHECK SELURUH UNIT BUS



Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana, mengatakan momen Nataru sama seperti Lebaran. Masyarakat akan memanfaatkan momen untuk pulang kampung atau mudik.

"Untuk tahun ini kami tidak lagi fokus pada pengetatan perjalanan, tapi konsepnya adalah kami akan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan tentunya ketertiban lalu lintas," kata Cucu.

Cucu Mulyana menegaskan pada tahun ini ramp check akan diwajibkan bagi seluruh bus, terutama bus pariwisata. Nantinya, setiap bus akan diwajibkan masuk ke terminal untuk diperiksa.

"Jadi bukan random ya, berarti setiap kendaraan harus melakukan *ramp check*. Tadi saya konfirmasi ke Direktorat Sarana sebagai *leading* sektor, jadi sampai sekarang itu baru mencapai di bawah 10%, sekitar 6,7% yang melakukan *ramp check*," ungkapnya.

Cucu menyampaikan kepada para anggota Dinas Perhubungan di seluruh daerah untuk menggenjot proses *ramp check*. Menurutnya, jika dilakukan mendekati pertengahan atau pekan ketiga pada bulan Desember sudah sangat terlambat.

"Mungkin saja datanya belum pada masuk, mungkin sebagian sudah dilaksanakan tapi data belum masuk tetapi data yang sudah masuk ke dalam aplikasi. Tercatat itu baru 6,7 persen, jadi baru sekitar 3.800 kendaraan yang melakukan *ramp check*," ucap Cucu.

"Biasanya yang kita evaluasi itu ada 58.000 kendaraan. Jadi sarana untuk tidak jauh berbeda dengan sarana untuk angkutan lebaran. Mudah-mudahan dalam satu minggu ini semuanya bisa bergerak," pungkasnya.*

SARANA

SEMILOKA KESELAMATAN LLAJ GAUNGKAN KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN



Kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara di jalan harus terus ditingkatkan seiring dengan masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas. "Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan 5 pilar aksi keselamatan jalan di mana tugas Ditjen Perhubungan Darat adalah pada pilar ke 3 yaitu mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan," ucap Kasubdit Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Tarma saat membacakan sambutan Direktur Sarana Transportasi Jalan pada kegiatan Semiloka Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2022 sebagai rangkaian acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) di Manado, Jumat (29/10).

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga terus

UMUM

DITJEN HUBDAT BERIKAN BANTUAN BAGI KORBAN GEMPA CIANJUR



Gempa Cianjur adalah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5.6 dengan kedalaman 10 km yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia pada 21 November 2022 pukul 13.21 WIB. Gempa ini dirasakan hingga Bandung, DKI Jakarta, Tangerang, Rangkasbitung, dan Lampung. Gempa yang melanda Kabupaten Cianjur tentu menyisakan penderitaan bagi banyak warga setempat. Segenap keluarga

berupaya untuk menangani permasalahan-permasalahan terkait kecelakaan terutama yang menyangkut angkutan barang dan angkutan umum.

"Pihak kami juga berusaha menekan angka kecelakaan dengan normalisasi kendaraan bermotor, penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e), implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU), percepatan Sertifikasi Kompetensi Penguji, Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UP-UBKB) dan yang lainnya," lanjut Tarma.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, Mangasi Sinaga dalam laporannya menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dihimpun dari Korps Lalu Lintas Polri pada tahun 2020, tingkat fatalitas kecelakaan LLAJ banyak melibatkan sepeda motor, kendaraan kecil/*pickup* dan juga kendaraan angkutan barang/truk *Over Dimension Over Load* (ODOL).

"Tingkat fatalitas kecelakaan ini harus menjadi perhatian serius, maka dari itu maksud dari kegiatan ini yakni menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap peraturan & ketentuan dalam melaksanakan tugas sebagai Pembina LLAJ, Penguji Kendaraan Bermotor dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)," jelas Mangasi.*

besar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengucapkan turut berduka cita atas bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.

Pada 27/11/2022 Ditjen Perhubungan Darat bersama Dharma Wanita Persatuan memberikan bantuan kepada korban gempa Cianjur berupa perlengkapan tidur, sembako, susu bagi anak-anak, obat-obatan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya.

Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban dan kondisi dapat segera pulih.*



Menjelang perhelatan akbar KTT G20, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-DRJD 3 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 Tahun 2022 Bali pada 31 Oktober 2022.

Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana dalam keterangan pers yang disampaikan pada Jumat (04/11) menyatakan bahwa ada 2 jenis pengaturan lalu lintas selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yaitu dengan skema penerapan sistem ganjil genap dan pembatasan operasional angkutan barang.

"Kami sudah melakukan survei jauh-jauh hari, mulai dari penerapan survei tersebut sampai dengan terbitnya surat edaran, dengan survei tersebut kinerja lalu lintas di Bali sudah mulai tumbuh wisatanya sehingga banyak ruas jalan yang *level of service* nya padat, ramai, namun lancar. Oleh karena itu dilakukanlah skema rekayasa dengan ganjil genap dan pembatasan angkutan barang," jelas Cucu.

Adapun pengaturan lalu lintas melalui penerapan sistem ganjil genap dan pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan serentak mulai pada tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 mulai pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.

"Karena kita memperhatikan wisata di Bali yang mulai tumbuh, sehingga pengaturan lalin di samping memperhatikan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan KTT juga tetap ingin menjaga perekonomian yang sedang tumbuh di Bali," tambahnya.

Cucu menjabarkan bahwa uji coba akan dilakukan pada tanggal 9 dan 10. "Jadwal uji coba dilakukan pada tanggal 9 mulai pukul 11.00-16.00 WITA, sementara tanggal 10 mulai pukul 17.00-20.00 WITA," kata Cucu.

Pengaturan lalu lintas ganjil genap dan pembatasan angkutan barang



Petugas BPTD XII Bali-NTB sedang melakukan pantauan lalu lintas di ruas jalan di Bali. Selama penyelenggaraan KTT G20 di Bali diberlakukan pengaturan lalu lintas yaitu dengan penerapan sistem ganjil genap dan pembatasan operasional angkutan barang.

LALULINTAS

MANAJEMEN LALU LINTAS PADA KTT G20 DI BALI

diberlakukan pada 10 ruas jalan utama yaitu :

1. Simpang Pesanggaran - Simpang Sanur;
2. Simpang Kuta - Simpang Pesanggaran;
3. Simpang Kuta - Tugu Ngurah Rai;
4. Tugu Ngurah Rai - Nusa Dua;
5. Simpang Pesanggaran - Gerbang Benoa;
6. Simpang Lapangan Terbang (DPS) - Tugu Ngurah Rai;
7. Jimbaran - Uluwatu;
8. Jalan Tol Bali Mandara;
9. Jalan Uluwatu II;
10. Jalan Raya Kampus Udayana.

Pengaturan lalu lintas ini tidak berlaku bagi sejumlah kendaraan seperti kendaraan milik pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan dan pejabat negara asing, kendaraan dinas dengan plat merah atau nomor dinas TNI/POLRI, pemadam kebakaran, ambulans, angkutan umum dengan plat kuning, kendaraan KTT G20, kendaraan bermotor listrik, kendaraan penyandang disabilitas, mobil derek, dan kendaraan untuk kepentingan tertentu.

Pembatasan Angkutan Barang

Sementara itu mengenai pembatasan operasional angkutan barang akan diberlakukan pada kendaraan barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 8.000 kilogram, mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan digunakan untuk mengangkut tanah, pasir, batu, bahan tambang, dan bahan bangunan.

Pengaturan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan laut yang menangani ekspor dan impor, air minum dalam kemasan, ternak, pupuk, hantaran pos dan uang, kebutuhan logistik KTT G20, barang pokok bahan makanan.

"Jika ada diskresi atau hal hal pengecualian dalam jika terjadi bencana maupun huru hara, ini merupakan hal yang harus kita siapkan. Pengaturan lalu lintas melalui ganjil genap dan pembatasan angkutan barang dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Cucu.*

Kita memperhatikan wisata di Bali yang mulai tumbuh, sehingga pengaturan lalu lintas di samping memperhatikan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan KTT juga tetap ingin menjaga perekonomian yang sedang tumbuh di Bali.



Dirjen Hubdat Hendro Sugiarno meninjau kesiapan prasarana jelang Nataru di Terminal Harjamukti Cirebon, Terminal Tegal, Terminal Bulupitu Purwokerto, dan Terminal Bobotsari Purbalingga, 13/10/2022. Foto: HMS DJPD/MAD



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno, Kepala BPTD IX Jawa Barat Denny Michels Adlan meninjau Terminal Leuwi Panjang Bandung, 1/10/2022. Foto: HMSDJPD/MAD



► Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto Restyawan menyerahkan potongan tumpeng kepada Kepala BPLJSKB Yusuf Nugroho pada Persiapan Pelaksanaan BPLJSKB menjadi Badan Layanan Umum, 7/10/2022. Foto: HMS DJPD/MAD



▲ *Electronic Vehicle Funday*, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 20/11/2022. Foto: HMS DJPD/BYU



▲ Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Lintas Instansi, Kantor Pusat Kemenhub Jakarta, 13/12/2022. Foto: HMS DJPD/BYU



◀ Perjanjian Kerjasama Integrasi Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Kartu Uang Elektronik Pada Program Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Buy The Service, 26/10/2022. Foto: HMS DJPD/BYU



◀ Pemberian Cenderamata bagi Purna Bhakti di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, 26/10/2022. Foto: HMS DJPD/WBW



◀ Pengambilan sumpah ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, 12/10/2022. Foto: HMS DJPD/WBW



◀ Rapat Koordinasi Bidang Perhubungan Darat Tahun 2022 di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, 22/11/2022. Foto: HMS DJPD/WBW

▶ *Flag Off Touring Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Jakarta - Bali 2022, Lapangan Monas, 7/11/2022. Foto: HMS DJPD/WBW*



▶ Menhub Budi Karya Sumadi dan Mendikbudristek Nadiem Makarim meresmikan Bus Listrik Merah Putih yang akan digunakan untuk melayani para delegasi dan peserta KTT G20 di Bali, 13/11/2022. Foto: HMS DJPD/TOL



Touring Kendaraan Listrik Jakarta - Bali singgah ke sejumlah kota antara lain Cirebon, Semarang, Solo, Madiun, Surabaya, Jember, lalu menyeberang ke Bali.



▶ Pembukaan Pameran Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai KTT G20 merupakan kolaborasi Kemenhub bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Bali Collection, Nusa Dua, Bali, 11/11/2022. Foto: HMS DJPD/MAD

